



Laporan Kinerja
Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta
2021

Sambutan



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2021 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala



Shodiqin , SH, MM



LKIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

Tahun Anggaran 2021

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
Executive Summary.....	v
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS.....	3
D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI.....	4
E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG.....	4
F. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II.....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	7
B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2020.....	16
C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021.....	18
D. Perjanjian Kinerja.....	21
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program.....	25
BAB III.....	28
A. CAPAIAN KINERJA BKKBN.....	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	50
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	52
D. EVALUASI KINERJA.....	66
BAB IV.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2019-2021	vi
Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020.....	16
Tabel 2.2 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2021.....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	28
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	29
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020.....	31
Tabel 3.4 Perbandingan Tahun 2020 dengan Dua Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2021 dengan Jangka Menengah 2024.....	33
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021	47
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2021.....	50
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2021 per program.....	51
Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2021.....	69
Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY	3
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR.....	40
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR.....	41
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need	42
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan mCPR.....	43
Gambar 3.5 Grafik Perkembangan mCPR.....	44
Gambar 3.6 Grafik Perkembangan mCPR.....	45

Executive Summary

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**, dengan misi :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 6 sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini terdapat 15 (lima belas) indikator, diantaranya terdapat indikator Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sebanyak 6 (enam) indikator. Dari 15 (lima belas) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tersebut 2 (dua) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 12 (dua belas) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran 89,10% s.d. 100%.

Namun, pada indikator presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) persentase capaian berada di kisaran 100% s.d. 114,04%.

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 0.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18	1,80	117,43%	1,92	1,81	105,73%	1,90	1,91	99,47%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61,95	53,79	86,83%	62,01	57,10	92,08%	62,40	55,60	89,10%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,23	10,01	78,37%	5,74	9,04	71,43%	5,62	19,80	-152,31%
4	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	35.435	35.435	100,00%	51.768	51.768	100,00%	51.768	51.768	100,00%
5	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418	418	100,00%	418	418	100,00%	422	422	100,00%
6	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	323	279	86,38%	323	267	82,66%	235	268	114,04%

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2021 telah berhasil terserap sebesar 98,30%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.558.268.000,- , jumlah yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 50.683.853.092,-

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmea.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perwakilan BKKBN DIY berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, BKKBN berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” dan mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat untuk mendukung agenda prioritas tersebut.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

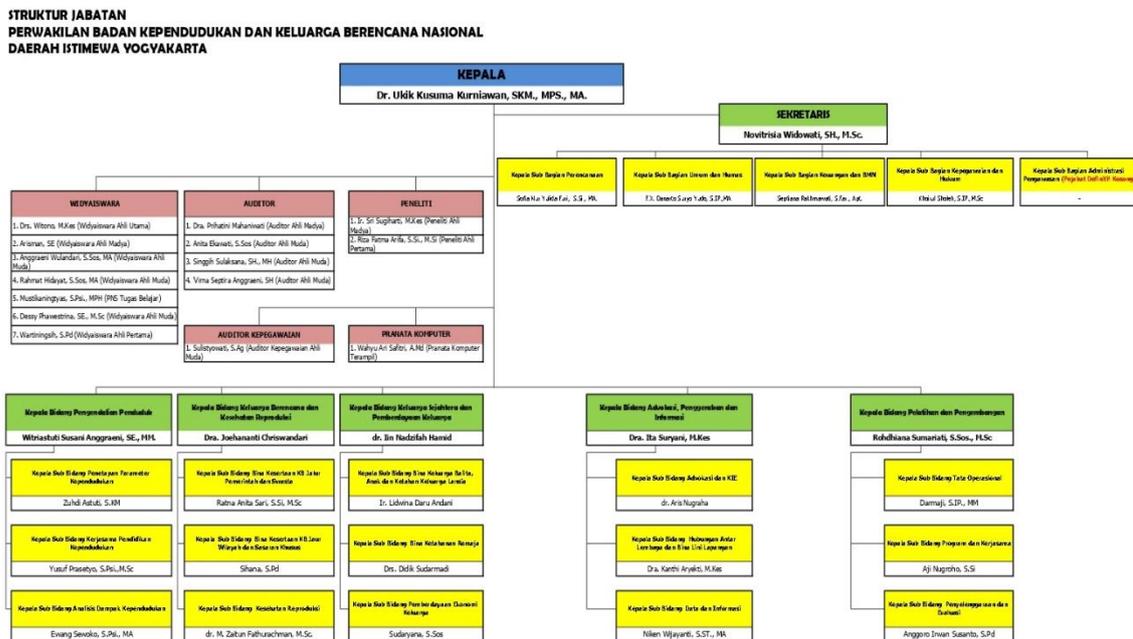
Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 82 Tahun 2011, Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY termasuk dalam tipologi Perwakilan BKKBN Provinsi tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang serta rumpun jabatan fungsional tertentu. Adapun struktur organisasi Perwakilan BKKBN digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN). Dalam Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” BKKBN berperan dalam Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” BKKBN memiliki peran pada Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah diberi mandat untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terkait dengan Prioritas Nasional tersebut yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Road Map RB-BKKBN terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map RB BKKBN 2020 – 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel serta Pelayanan publik yang prima.

E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

1) PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

- a) Masih tingginya angka kebutuhan ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi (*unmetneed*). Berdasarkan data SKAP *unmetneed* DIY dari tahun 2017 mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dengan angka *unmetneed* sebesar 14,5.
- b) Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dispensasi pernikahan usia anak yang diberikan di DIY akibat kehamilan yang tidak diinginkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Fenomena pernikahan usia anak ini merupakan fenomena yang mengerikan karena akan berdampak panjang bagi keluarga baru yang terbentuk, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental.
- c) Pandemi Covid-19 yang melanda diawal tahun 2020 ini menjadikan permasalahan yang berdampak pada akses pelayanan KB untuk masyarakat. Salah satu contoh tidak bisa mengadakan bhakti sosial pelayanan KB yang bersifat masal sehingga pelayanan KB tidak bisa terlaksana sepenuhnya.

2) TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Penyesuaian kegiatan sesuai protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya mematuhi instruksi Gubernur DIY tentang “Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19” dan “Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 pada saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021”, kegiatan yang berjalan pada tahun 2020 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini antara lain; layanan Keluarga Berencana, konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, penelitian, dan sebagainya.
- b) Refocusing anggaran sebesar Rp 7 Milyar untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 dan penyesuaian anggaran untuk penyediaan perlengkapan pendukung protokol kesehatan (Alat Pelindung Diri, hand sanitizer, desinfektan, sabun tangan, dsb) yang biayanya tidak teranggarkan di awal tahun.
- c) Pelayanan KB pada masa pandemi COVID-19, yang semula direncanakan secara massal dan gratis untuk masyarakat, kuantitasnya jadi berkurang. Dukungan anggaran untuk melayani pemberian alat dan obat kontrasepsi lebih mahal daripada pelayanan sebelum pandemi karena BKKBN harus menambah penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang melayani kontrasepsi.

3) PELUANG

Peluang yang dimiliki Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan komitmen sinergi dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY.
- b) Ketersediaan Penyuluh KB, kelompok kegiatan dan tenaga lini lapangan yang mampu bertugas kolaboratif dengan melakukan adaptasi sesuai protokol kesehatan.

- c) Etos kerja pegawai serta ketersediaan fasilitas pendukung dalam adaptasi bekerja di masa pandemi Covid-19. Fasilitas ini antara lain; perangkat daring dan Learning Management System berbasis Teknologi Informasi untuk pelatihan daring.
- d) Adanya dukungan mitra kerja dan komitmen lintas sektor (pemerintah daerah, swasta, lembaga non pemerintah, masyarakat) dalam mensukseskan Program Bangga Kencana.

F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

a. Kesertaan ber KB

- 1) Kesertaan ber KB dengan cara modern masih rendah (57,1%), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 10,3% menjadi 18,6% (laporan SDKI 2017)
- 2) Angka Putus Pakai masih tinggi yaitu sebesar 28,4% (laporan SDKI 2017) Hal ini menunjukkan bahwa capaian peserta KB baru (PB) tidak berdampak terhadap penambahan Peserta KB aktif (PA) modern.
- 3) Prevalensi KB MKJP mengalami penurunan sebesar 2,5% dan saat ini menjadi 18,6%, terutama penurunan pemakaian KB IUD/AKDR/Spiral (laporan SDKI 2017)

b. Masih rendahnya indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yaitu 64,4% (Laporan SKAP 2018).

c. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

- 1) Pesan Kunci Advokasi dan KIE perlu penajaman, terdapat Kesenjangan Mendapatkan Informasi
- 2) Peran mitra kerja dalam operasional program Bangga Kencana perlu ditingkatkan
- 3) Dukungan tenaga penggerak lini lapangan perlu ditingkatkan
- 4) Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Keluarga perlu dioptimalkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat.

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berisi tentang sasaran, strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

A.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian :

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.
- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu :

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

- 1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
- 2. Meningkatkan angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)
4. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Sasaran Program Tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
2. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Tercapainya sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas
4. Meningkatnya presentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) sebagai berikut :

1. Tersedianya alokasi di Fasilitas Kesehatan
 - Pemenuhan ketersediaan alokasi di faskes
2. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK
 - Keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK
3. Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
 - Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

4. Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)
 - Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 - Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
 - Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah
 - Penggerakan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 - Layanan dukungan manajemen eselon I
 - Layanan sarana dan prasarana internal
 - Layanan perkantoran
 - Layanan audit internal
 - Layanan pendidikan dan pelatihan
 - Layanan penelitian dan pengembangan

2. Proyek Prioritas Nasional

- Pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes
- Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK
- Peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
- Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai indikator sasaran program sebagai berikut :

Bidang KSPK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
- Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
- Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
- Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
- Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga

Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
- Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
- Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
- Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
- Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

- Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan

Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
- Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*)
- Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
- Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
- Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan

Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase *stakeholders*/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
- Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
- Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
- Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
- Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bidang Lalitbang Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik
- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi

Indikator Sasaran program DKM :

- Tingkat kepuasan layanan dukungan manajemen program bangga kencana
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani

A.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
 - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
 - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- Penguatan kapasitas fakses dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - Peningkatan KB pria.
 - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
 - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi rumusan kebijakan.

b. Aspek Dukungan Manajemen

Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi:

- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
- Penguatan perencanaan program dan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
- Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi:

- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
- Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2020

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	44.456 Keluarga
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	281 PIK R
		141 BKR
3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 BKL
4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	910 Keluarga
5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	70 %
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	58 RDK
3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov & 1 Kab/Kota
4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur
5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov & 1 Kab/Kota
6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	156 Kampung KB
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	65,4 %
2	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	72,9 Indeks (Skala 0-100)
3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,01 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2021	
	4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23,7	%
	5	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	21,4	%
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	37,6	Stakeholder /Mitra
	2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	60	%
	3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	70	%
	4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	Kab/Kota
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	45	%
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Indeks ZI WBK	77	Indeks

C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	4	Kab/Kota
	2	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	51.768	Keluarga
	3	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	4	Kab/Kota
	4	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	422	PIK Remaja dan BKR
	5	Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	5	Kab/Kota
	6	PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	1	PPKS
	7	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	4	Kab/Kota
	8	Jumlah Kampung KB Percontohan yang melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP	5	Kampung KB Percontohan
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Keluarga	1 Prov & 5 Kab/Kota	
	2	Cakupan koordinasi integrasi indikator program bangga kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota	
	3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	82	Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021
4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	67 Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
5	Cakupan fasilitasi penggerakan kelompok kerja Bangga Kencana Provinsi dan kab/kota	1 Prov & 0 Kab/Kota
6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal	1 Prov & 1 Kab/Kota
7	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Kab/Kota
8	Presentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	3 Kab/Kota
9	Presentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	20% Presentase Mitra Kerja
10	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna pada Kampung KB Percontohan yang mengintegrasikan Data dan Informasi Keluarga	6 Rumah Data Kependudukan Paripurna
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat	171 FKTP
2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	219 Tenaga kesehatan (kumulatif)
3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang kompeten	4 Provider
4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di wilayah dan sasaran	3 Gerak
5	Persentase PUS dengan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)	0 Persen
6	Jumlah kab/kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB pascapersalinan	2 Kab/kota
7	Faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan Alokasi MKJP	235 Faskes
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	MoU/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di BKKBN	1 Pemerintah Daerah
2	Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas Utuh	2 Kab/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021
3	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	0 Kab/Kota
4	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need	0 Kab/kota
5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	3 Frekuensi
6	Presentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi	40% Tim Persen Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & kab/koat)
7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Program Bangga Kencana di Wilayah Binaan	12 Frekuensi kegiatan
8	Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat	5 Kab/kota
9	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	223 Orang
10	Cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangga Kencana	5 Kab/Kota
11	Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebaran informasi	5 Kab/Kota
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Jumlah Tenaga Program yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	154 Orang
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan	3 Dokumen
3	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal nasional/internasional	2 Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	
Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	1 Layanan
2	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	13 Bulan layanan
3	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan layanan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021
4	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 Unit
Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan 'selesai'	1 Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No 104/KEP/B1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 memuat indikator sasaran strategis, indikator kinerja renstra, proyek prioritas nasional (Pro PN) dan indikator strategis di luar renstra yang terdiri dari indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	9 rata-rata anak per wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	62,4%
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,62%
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,07 (skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23 tahun
7	Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan	1	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)	1 makalah
		2	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	1 jurnal
		3	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	1 jurnal
8	Meningkatnya keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	51.768 keluarga
9	Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422 PIK Remaja dan BKR

10	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 Kelompok BKL
11	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan	1	Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5 Kampung KB Percontohan
12	Meningkatnya fasilitasi pembinaan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan		Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan	1 Kampung KB percontohan Provinsi dan 5 Kampung KB Percontohan Kab/Kota
13	Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	235 Faskes

NO	KEGIATAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	24.414.000
		2	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	40.474.000
		3	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	59.749.000
		4	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga	208.433.000

		5	Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	6.341.389.000
		6	SDM internal dan eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	91.187.000
		7	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana	51.200.000
		8	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	503.389.000
		9	Tim Pendamping Keluarga yang mendapat paket data	555.600.000
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	81.070.000
		2	Layanan Perkantoran	41.482.405.000
		3	Layanan Sarana Internal	124.680.000
		4	Layanan Prasarana Internal	-
		5	Layanan Pengawasan Internal	67.760.000
3	Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)	1	Keluarga dengan baduta yang mendapat fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	59.589.000
		2	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	203.795.000
		3	Kelompok BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	32.385.000
		4	Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	67.142.000
		5	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di Kampung KB Percontohan	74.350.000

	6	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	1.489.257.000
	TOTAL ANGGARAN		51.558.268.000

Perjanjian kinerja tahun 2020 dilakukan antara Kepala BKKBN dengan Kepala Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, kemudian antara Kepala Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dengan eselon III, Eselon III dengan Eselon IV, yang terakhir antara Eselon IV dengan staf. Untuk jabatan fungsional tertentu juga melakukan perjanjian kinerja dengan atasan masing-masing.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta mengalami beberapa kali revisi. Revisi pertama dilakukan adanya penyesuaian anggaran setelah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid dengan target tetap, sedangkan revisi perjanjian kinerja selanjutnya untuk penyesuaian target sehingga perjanjian kinerja yang digunakan merupakan perjanjian kinerja setelah revisi ke 2 dengan penyesuaian target.

E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin.

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui :

a. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)

Kegiatan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan setiap bulan sekali dengan penyesuaian bentuk kegiatan karena pandemi covid-19. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan dengan tatap muka dan virtual meeting serta dilakukan secara bergiliran ke kabupaten kota serta di kantor Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta. Peserta kegiatan Rapat Pengendalian Program adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, perwakilan dari OPD KB kabupaten kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB.

Pada kegiatan rapat pengendalian program dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun keuangan, setiap bulan

sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan dalam melaporkan capaian program adalah Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) serta Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon). Sedangkan untuk laporan keuangan menggunakan data dari F/II/Keu dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

Melalui kegiatan rapat pengendalian program ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. RAKORDA (Rapat Koordinasi Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

c. Review / Telaah Program Bangga Kencana

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra

kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/ capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

d. Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Pada kegiatan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis program Bangga Kencana terdapat target kinerja bulanan yang disusun untuk mengontrol pencapaian target kinerja dalam satu tahun. Dengan penetapan target bulanan maka Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dapat membuat strategi pelaksanaan program supaya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai. Monitoring bulanan perlu dilakukan supaya apabila terdapat permasalahan atau kendala di tengah jalan maka segera bisa dicarikan pemecahan masalahnya. Monitoring dan evaluasi tersebut dapat dilihat di <https://yogya.bkkbn.go.id/rapk/>

e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana melalui e-monev Bappenas

e-monev adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil capaian dari kegiatan Program Bangga Kencana yang telah dilakukan. Output/capaian diinput ke aplikasi ini sebulan sekali. Melalui aplikasi ini, Bappenas juga dapat ikut memantau pencapaian Program Bangga Kencana terutama kegiatan proyek Pro PN. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek Pro PN dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan/kendala.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BKKBN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2021.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan skala pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Utama nomor 458/RC.06/B1/2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian (Persen)	Skala Pengukuran	Status Capaian
1	≥ 90	Sangat Baik	Hijau 
2	80 – 89	Baik	Biru 
3	70 – 79	Cukup	Kuning 
4	< 70	Kurang	Merah 

1) Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 13 (tiga belas) sasaran kinerja dengan 15 (lima belas) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021. Cara pengukuran kinerja tahun 2021 ini berdasarkan pada Definisi Operasional Perjanjian Kinerja Provinsi yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat (terlampir). Adapun hasil pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,90	1,91	99,47%	PK 21
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	62,40	55,60	89,10%	PK 21
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,62	19,80	-152,31%	PK 21
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,00	9,10	143,13%	PK 21
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,07	57,41	91,03%	PK 21
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	22,90	99,57%	PK 21
7	Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan	1	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)	1,00	1,00	100,00%	e-Monev
		2	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	1,00	1,00	100,00%	e-Monev
		3	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	1,00	1,00	100,00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
8	Meningkatnya keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	51.768	51.768	100,00%	e-Monev
9	Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	422	100,00%	e-Monev
10	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	143	100,00%	e-Monev
11	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB	1	Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	5	100,00%	e-Monev
12	Meningkatnya fasilitasi pembinaan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan		Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan	6	6	100,00%	e-Monev
13	Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	235	268	114,04%	e-Monev

Dari 15 (lima belas) indikator tersebut, 2 (dua) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 12 (dua belas) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran 89,10% s.d. 100%. Namun, pada indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (*Unmet need*) capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY jika diukur dari capaian target tahun 2021 yang terdapat dalam Renstra 2020 – 2024 Perwakilan BKKBN DIY, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	1,90	1,91	99,47%	PK 21
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	62,40	55,6	89,10%	PK 21
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	5,62	19,80	-152,31%	PK 21
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	16,00	9,10	143,13%	PK 21
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,07	57,41	91,03%	PK 21
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	22,90	99,57%	PK 21

5 (lima) dari 6 (enam) indikator yang ada, dapat dicapai dengan kisaran capaian 89,10% s.d. 143,13%. Bahkan 4 (empat) indikator memiliki indeks capaian baik sekali (persentase capaian diatas 90%). Meskipun demikian masih ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase *Unmet Need* dan perlu ditinjau kembali dalam penetapan target karena capainnya sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Dukungan berbagai pihak yang menjadi mitra pelaksanaan Program Bangga kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Tingginya komitmen dan perhatian dari stakeholder maupun masyarakat dalam menerima Sosialisasi Program Bangga kencana
- c. Adanya Perda Ketahanan Keluarga tahun 2018 sebagai rujukan bahwa pelaksanaan program ketahanan keluarga dilaksanakan dengan lintas sektor
- d. Adanya kampung KB sebagai miniatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Bangga kencana

e. Adanya anggaran desa sebagai salah satu pendorong keberlangsungan program Bangga kencana di tingkat wilayah

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Program Bangga kencana di DIY antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan media dalam advokasi dan KIE.
- b. Sosialisasi dan promosi program Bangga kencana belum semuanya terfokus pada sasaran
- c. Kurangnya sinergitas program dan anggaran dengan mitra kerja terkait atau pengelola program dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah dalam melakukan pembinaan program Bangga kencana

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dengan Dua Tahun Sebelumnya (2020 dan 2019)

Tabel 3.4 Perbandingan Tahun 2020 dengan Dua Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18	1,80	117,43%	1,92	1,81	105,73%	1,90	1,91	99,47%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61,95	53,79	86,83%	62,01	57,10	92,08%	62,40	55,60	89,10%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,23	10,01	78,37%	5,74	9,04	71,43%	5,62	19,80	-152,31%
4	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	35.435	35.435	100,00%	51.768	51.768	100,00%	51.768	51.768	100,00%
5	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418	418	100,00%	418	418	100,00%	422	422	100,00%
6	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	323	279	86,38%	323	267	82,66%	235	268	114,04%

Dari 13 (Tiga Belas) indikator Perjanjian Kinerja hanya 6 (enam) indikator yang selalu diukur dari tahun 2019, yaitu Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun), Persentase pemakaian kontrasepsi

modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR), Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), Jumlah Keluarga dengan Baduata yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK, Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu serta Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/obat Kontrasepsi (Alokasi). Sementara 7 (tujuh) indikator lainnya tidak dapat diukur perbandingan kinerjanya dikarenakan indikator tersebut tidak selalu ada di setiap tahunnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2021 dengan Jangka Menengah 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	1,83	1,91	95,63%	Diperkiraan tercapai
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	63,67	55,6	87,33%	Diperkiraan tercapai
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	5,29	19,80	-174,29%	Perlu Upaya dan Startegi lebih kuat untuk mencapai target
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	12,00	9,10	124,17%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95	57,41	117,93%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	22,90	100,43%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan

Dari capaian diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat 5 (lima) indikator renstra yang sudah berjalan sesuai jalur dan diperkirakan tercapai. Namun ada 1 (satu) indikator, yaitu *Unmet Need*, yang perlu untuk ditinjau kembali penetapan targetnya karena capaian indikator tersebut sangat jauh dari target serta masih memerlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai target di tahun 2024.

4) Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (*TFR*) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 99,47% dari target *TFR* yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2021 sebesar 1,90. Sesuai Data Pendataan Keluarga (PK) 2021, angka *TFR* tahun 2021 tercapai sebesar 1,92

Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas *TFR* yang ditoleransi adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai *TFR* ideal sejak tahun 1991 (nilai *TFR* adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2021 (nilai *TFR* adalah 1,92). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi *TFR* di DIY telah ideal. Hal ini menunjukkan program Banggakencana mampu diimplementasikan dengan baik di DIY sehingga *TFR* dapat dipertahankan dalam angka ideal, tetapi tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capaian *TFR*.

2. Persentase Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*)

Berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK) 2021 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase *mCPR* sebesar 55,6% dari total PUS yang ada. Pencapaian *mCPR* ini belum dapat memenuhi target KKP yang ditetapkan sebesar 62,4%. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional, karena secara umum *CPR* naik namun rendah pada *mCPR*.

Advokasi penggunaan alat kontrasepsi modern pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi harus ditingkatkan karena pada sasaran ini yang merupakan penyumbang besar pengguna kontrasepsi tradisional.

3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Pada tahun 2021 berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK) 2021, Persentase *Unmet need* di DIY sebesar 19,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY belum dapat mencapai target KKP yang ditetapkan sebesar 5,62%. Kondisi ini disebabkan oleh

banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian unmet need KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Sehingga perlu adanya peningkatan promosi, KIE juga advokasi tentang penggunaan alat kontrasepsi modern terutama pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi.

Namun demikian jika melihat angka capaian yang terlalu jauh dengan target yang ditetapkan maka diperlukan untuk meninjau kembali penetapan target *unmet need* tersebut

4. Angka Kelahiran Pada Remaja (*ASFR* 15-19 tahun)

ASFR 15-19 tahun di DIY pada tahun 2021 adalah 9,10 angka ini 5 point lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 16 atau tercapai sebesar 143,13%. Hal tersebut menggambarkan bahwa program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satunya dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan.

5. Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)

Berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK) 2021 Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) DIY tahun 2021 adalah sebesar 57,41. Angka menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 91,03% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63,07. Terbatasnya komunikasi antar anggota keluarga berpengaruh dalam rendahnya nilai indeks kebahagiaan yang merupakan salah satu indeks dalam *iBangga*. Hal tersebut dikarenakan pada era pandemi mewajibkan segala aktivitas dilakukan di rumah sehingga setiap anggota keluarga disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Melihat kondisi tersebut diperlukan untuk menggaungkan kembali pentingnya 8 fungsi keluarga kepada masyarakat melalui peningkatan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.

6. Median Usia Kawin Pertama

Median usia kawin pertama DIY Tahun 2021 sebesar 22,9 yang berarti sudah dapat mencapai 99,57% dari target yang ditetapkan sebesar 23. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan program Genre di DIY melalui

kampanye Triad KRR bagi remaja. Meskipun demikian masih butuh penekanan pada sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan bagi remaja di DIY.

7. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pamakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)

Penelitian ini di presentasikan dan diajukan pada kegiatan Seminar Online Nasional dan Paralel Session “Konvergensi Intervensi Spesifik dan Sensitif Menuju Indonesia Bebas Stunting” di tanggal 8 November 2021”, dengan judul paper : “Disimilaritas Perilaku dalam Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga”

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku penyebab risiko stunting, antara lain perawatan kehamilan (kunjungan ANC), perawatan anak (pemberian vaksin), berat badan lahir bayi, dan durasi pemberian ASI menurut status ekonomi rumah tangga.

Dari kajian ini terlihat bahwa Status ekonomi rumah tangga terbukti signifikan berbeda terhadap perilaku perawatan kehamilan maupun perawatan anak, Ibu yang kaya lebih sering melakukan kunjungan ANC dan memberi vaksin dasar anak lebih lengkap daripada ibu dari kalangan menengah bawah. Namun, Ibu kaya cenderung lebih singkat memberikan ASI pada 6 bulan pertama sejak lahir.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya penguatan pendampingan dan intervensi pada ibu hamil dan menyusui dari kalangan menengah bawah untuk mencegah risiko kesehatan pada ibu dan anak. Namun, pemberian edukasi dan informasi secara masif dan intensif tentang ASI eksklusif dan manfaat pemberian ASI terhadap kesehatan anak masih diperlukan ibu yang memiliki status ekonomi lebih tinggi

8. Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang di terbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi

Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan berjudul “*Aging Management Model at Dayakan Village Kulon Progo District, Yogyakarta Special Province*” yang diterbitkan pada jurnal *Journal of US- China Public Administration* (ISSN 1548-859 (print) ISSN 1935-9591 Volume 18 Nomor 4 tahun 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model ketahanan dan

ketanggungan lansia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan proses penelitian operasional.

Hasil penelitian menemukan model integrasi rumah tangga dengan lansia melalui partisipasi masyarakat dan keluarga, serta pelatihan intensif, manajemen lansia terintegrasi dengan sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Komitmen dari masing-masing lembaga lokal yang menangani manajemen lansia mendukung keberhasilan penelitian.

9. Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang di terbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional

Judul Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan adalah “Konseling Keluarga Berencana Selama Pandemi Covid-19” yang diterbitkan pada jurnal Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan (Volume 6, Issue 1, March 2021, pp 37-44 ISSN 2502-4825 (print), ISSN 2502-9495 (online)). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pasangan usia subur dalam mengakses layanan konseling KB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi cross-sectional dengan pendekatan survei daring dilakukan pada sebanyak 266 sampel pasangan usi yang sukarela berpartisipasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling erat hubungannya dengan perilaku pasangan usia subur dalam mengakses layanan konseling KB pada masa pandemi adalah pengalaman mengunjungi fasilitas kesehatan dan pemakaian kontrasepsi baik modern maupun tradisional. Berdasarkan temuan ini, penguatan strategi dan inovasi promosi layanan KB perlu dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dengan berupaya menggeser layanan luring menjadi telehealth yang lebih berkualitas dan aman.

10. Jumlah Keluarga degan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK

Pengetahuan Keluarga yang memiliki Baduta terpapar dalam pengasuhan 1000 HPK bagi 51.768 keluarga yang mempunyai baduta sebagai salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sudah tercapai 100 %. Informasi dan edukasi tentang pengasuhan 1000 HPK yang disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta sosialisasi langsung oleh pakar/ *expert* dan juga para pemangku kepentingan. Dari aspek promotif,

preventif penyampaian informasi dan edukasi pentingnya pengasuhan 1000 HPK juga disampaikan pada ibu hamil, ibu menyusui serta para tokoh agama maupun masyarakat, hal tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam upaya penyebaran ilmu dan informasi.

11. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, sebagai target Pro PN berikutnya, tercapai 100 %. Dengan pembagian sasaran PIK Remaja sebanyak 281 kelompok dan BKR sebanyak 141 kelompok sehingga total sasaran sebanyak 422 kelompok. Sebagian besar kegiatan remaja dilaksanakan secara *hybrid*, antara kehadiran secara fisik juga dihadiri secara virtual, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan covid-19 dan juga sebagai upaya optimalisasi anggaran.
12. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
Indikator ini merupakan salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 143 kelompok. Kelancaran kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia tidak lepas dari adanya kerjasama dengan beberapa lintas sektor, termasuk Perguruan Tinggi (PT), yaitu Universitas Respati Yogyakarta. Kerjasama yang diwujudkan dengan PT adalah dalam bentuk kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas kader/ anggota kelompok BKL. Bersama Komda Lansia DIY, BKKBN juga ingin mewujudkan DIY yang ramah lansia
13. Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Merupakan salah satu indikator kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan target sebanyak 5 (lima) Kampung KB Percontohan. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan Keluarga Akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung KB Percontohan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung KB Percontohan melalui kelompok UPPKA, yang terdiri dari Kampung KB Jasem, Bantul (Kelompok UPPKA Lestari), Kampung KB Kroco, Kulon Progo (Kelompok UPPKA Mukti Migunani), Kampung KB Sengir, Sleman (Kelompok UPPKA Binakarya), Kampung KB Karangmiri, Gunungkidul (Kelompok UPPKA Anggrek) dan Kampung KB Rejowinangun 08, Kota Yogyakarta (Kelompok UPPKA Rewina).

Fasilitasi yang diberikan kepada kelompok UPPKA tersebut antara lain Pemberian Buku Materi (Buku Motivasi Ketahanan Ekonomi Keluarga, Buku 8 Langkah Tingkatan Penghasilan Ekonomi, Flipchart Pengelolaan Keuangan Keluarga), Pembelajaran dan Bimbingan yang berkaitan dengan usaha dan Pemberian bantuan sarana/alat pendukung produksi (Spinner, Vacuum Sealer, Alat Prespati dan Mixer)

14. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan

Sebagai salah satu kegiatan dari Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada 6 (enam) Rumah Data Kependudukan (RDK) Paripurna di Kampung KB Percontohan. Dari target tersebut Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target.

Adapun RDK yang dimaksud adalah Rumah Data Kependudukan Wedomartani, Ngemplak, Sleman; Rumah Data Kependudukan Jasem, Srimulyo, Piyungan, Bantul; Rumah Data Kependudukan Prawirodirjan Kota Yogyakarta; Rumah Data Kependudukan Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo; Rumah Data Kependudukan Dadapayu, Semanu, Gunungkidul; dan Rumah Data Kependudukan Potorono, Banguntapan, Bantul. Pembinaan yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola rumah data kependudukan.

15. Pemenuhan Ketersediaan Alkon di Faskes

Salah satu target kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah Fasilitas Kesehatan (Faskes). Sasaran Kinerja tersebut adalah Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes), dengan Indikator Kinerja jumlah faskes yang

mendapatkan pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) sebanyak 235 Faskes.

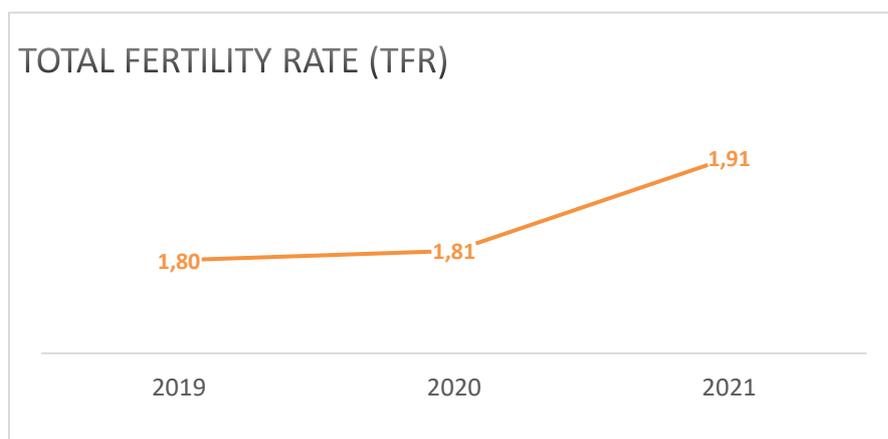
Berdasarkan laporan e-Monev, dari sebanyak 235 faskes yang ditargetkan, pada tahun 2021 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu memenuhi ketersediaan alokon di 268 Faskes (yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Swasta, Dokter Keluarga, dan Praktik Mandiri Bidan yang setara dengan Faskes). Dengan demikian, capaian untuk sasaran kinerja tersebut telah tercapai bahkan melampaui target, yaitu sebesar 114,04%.

5) Analisis Kenaikan atau Penurunan Kinerja

Dari 15 (lima belas) indikator yang ada dalam perjanjian kinerja, hanya 6 (enam) indikator yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Sehingga hanya 6 (enam) indikator tersebut yang bisa dianalisa kenaikan atau penurunan kinerjanya. Perkembangan kinerja dari keenam indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR

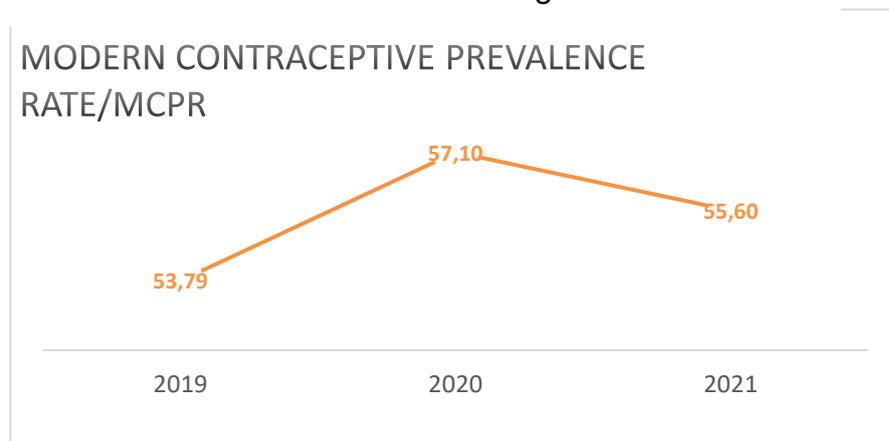


Sejak tahun 2019 trend Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun) terlihat masih fluktuatif. Dimana TFR mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak signifikan dan masih bisa dikatakan stabil. Angka TFR saat ini berkisar 1,91-1,8 masih dalam kondisi ideal, tetapi tetap harus

diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya. Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya yang lebih untuk menjaga TFR tetap pada kondisi ideal. Diantaranya perlu mempertajam sasaran program terutama kepada PUS usia muda yang masih memiliki masa reproduksi panjang.

2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*)

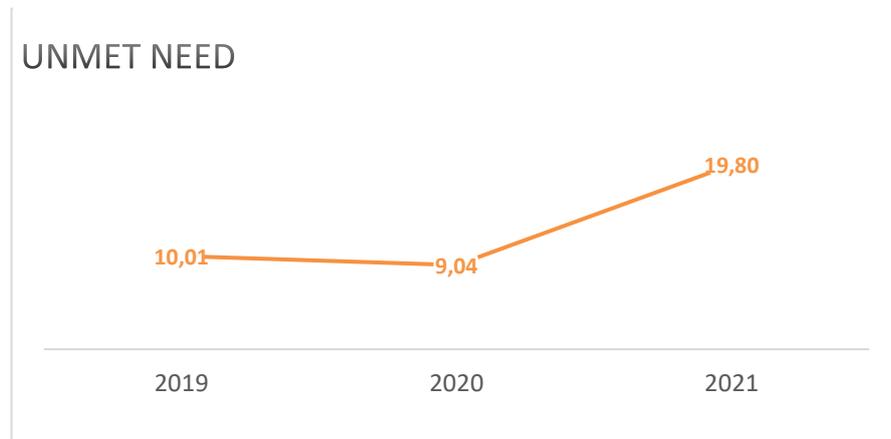
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR



Persentase mCPR di DIY pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan sebesar 3,31% atau dari 53,79% di tahun 2019 menjadi 57,10% dari jumlah PUS yang ada. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,5% atau menjadi 55,60%. Persentase tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2021. Menyikapi hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang *out of the box* untuk dapat meningkatkan persentase mCPR ini sebab trend dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan yang kecil bahkan tampak menurun di tahun 2021. Fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan Pendidikan tinggi dan perlu juga pengembangan metode KIE yang berbeda dan terfokus pada sasaran serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dengan penyusunan kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pasca Persalinan.

3. Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan *Unmet Need*

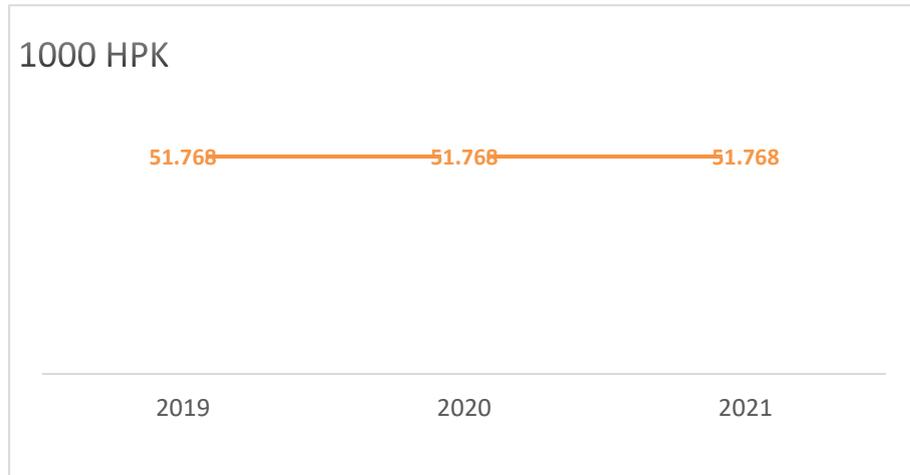


Indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) tampak terjadi penurunan pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,76%. Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur ibu, pendidikan, preferensi gender anak, pendapatan, pekerjaan, agama, pengetahuan mengenai kontrasepsi, komunikasi dengan pasangan, akses terhadap media dan tempat tinggal. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian *unmet need* KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan PUS yang menginginkan untuk ber KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok *unmet need* KB akan semakin berkurang.

4. Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapat fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK

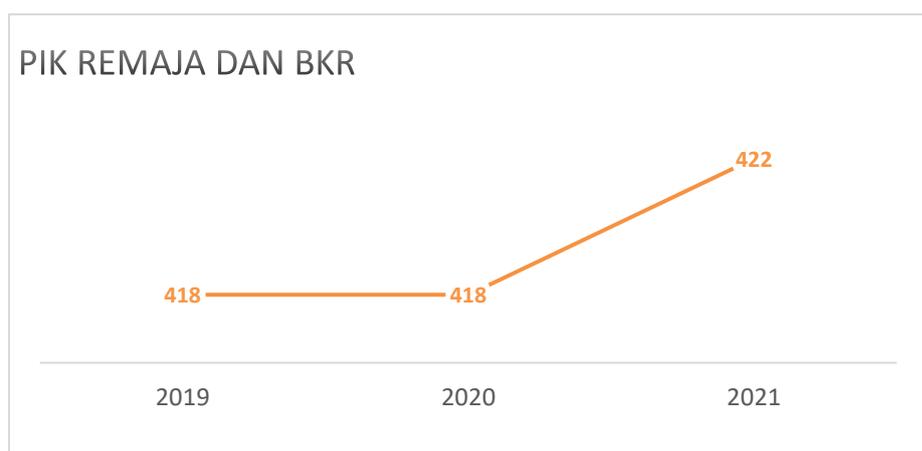
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan mCPR



Indikator ini merupakan salah satu indikator dari kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN). Sejak tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu memberikan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK kepada 51.768 keluarga yang memiliki baduta. Guna mempercepat penurunan angka stunting terutama di DIY perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan tentang pengetahuan 1000 HPK terutama bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta. Informasi dan edukasi tentang 1000 HPK disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta sosialisasi langsung oleh pakar/ *expert* dan juga para pemangku kepentingan.

5. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
Kelompok PIK Remaja dan BKR mempunyai peran penting dalam penurunan angka stunting dikarenakan salah satu sasaran kelompok kegiatan tersebut adalah remaja putri sebagai calon ibu.

Gambar 3.5 Grafik Perkembangan mCPR

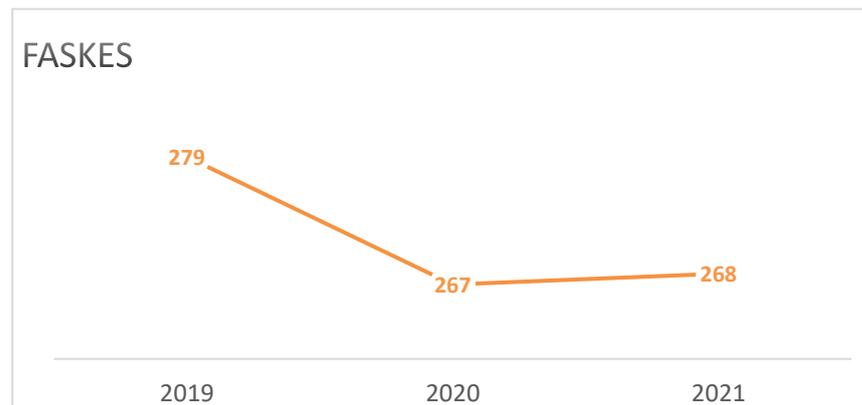


Dari tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah memberikan fasilitasi dan pembinaan tentang edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri kepada 418 kelompok kegiatan dan jumlah kelompok kegiatan tersebut mengalami kenaikan menjadi 422 kelompok di tahun 2021. Dengan semakin banyaknya kelompok kegiatan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di DIY. Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian modul “1001 Cara Bicara” untuk kelompok BKR dan modul “Tentang Kita” untuk kelompok PIK Remaja. Modul “1001 cara Bicara” berisi tentang cara-cara komunikasi efektif orangtua kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri. Sedangkan modul “Tentang Kita” berisi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sesuai dengan segmen usia (10-14 tahun; 15-19 tahun; 20-24 tahun). Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada kelompok kegiatan tentang modul tersebut.

6. Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)

Salah satu tugas pokok dari BKKBN adalah menyediakan alat/obat kontrasepsi (alokon). Dimana alokon tersebut didistribusikan ke fasilitas kesehatan agar dapat digunakan untuk pelayanan KB.

Gambar 3.6 Grafik Perkembangan mCPR



Pada tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah menyalurkan alokon ke 279 faskes. Faskes yang mendapatkan alokon tersebut adalah faskes yang telah terdaftar dalam databasis (K/0/KB) dan juga telah berjejaring dengan BPJS. Namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah faskes mengalami penurunan menjadi 267 dan 268 faskes hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faskes yang menjadi jejaring dari puskesmas sehingga distribusi alokon dilakukan ke puskesmas tersebut. Meskipun demikian, alokon tetap terdistribusi sampai ke faskes jejaring tersebut.

6) Langkah – langkah ke depan

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan

Unmet Need yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;

4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Teknologi Informasi

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Selain target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Perwakilan BKKBN DIY juga mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan yang ada dalam Renstra 2020 - 2024. Indikator tersebut terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi dan Program Dukungan Manajemen (DKM) Provinsi. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi				
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	44.456 Keluarga	40.900 Keluarga	92,00%
	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	281 PIK R	281 PIK R	100,00%
			141 BKR	141 BKR	100,00%
	3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 BKL	143 BKL	100,00%
	4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	910 Keluarga	1186 Keluarga	130,33%
	5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	70 %	70 %	100,00%
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	100,00%
	2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	58 RDK	32 RDK	55,17%
	3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov & 1 Kab/Kota	1 Prov & 1 Kab/Kota	100,00%
	4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur	3 Jalur	100,00%
	5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov & 1 Kab/Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	150,00%
	6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	156 Kampung KB	171 Kampung KB	109,62%

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN	
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi				
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	65,4 %	114 %	174,31%
	2	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	72,9 Indeks (Skala 0-100)	72,37 Indeks (Skala 0-100)	99,27%
	3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,01 %	87,26 %	153,06%
	4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23,7 %	11,5 %	151,69%
	5	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	18,4 %	15,88 %	86,30%
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	37,6 %	37,6 %	100,00%
	2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	60 %	75,98 %	126,63%
	3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	70 %	70 %	100,00%
	4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,00%
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	30 %	87,5 %	291,67%
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi				
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi				
	1	Indeks ZI WBK	77 Indeks	93,24 Indeks	121,09%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

a. Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi

Capaian kinerja kegiatan pada Program Bangga Kencana Provinsi berada pada kisaran 55,17% s.d 291,67%. Beberapa indikator kinerja kegiatan yang capaiannya masih dibawah 100% dan perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna Yang Terbentuk di Kampung KB hanya tercapai sebesar 55,17% atau hanya terdapat 32 Rumah Data Kependudukan (RDK) dari 58 RDK yang ditargetkan di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi sosialisasi Rumah Data Kependudukan (RDK) ke Kab/ Kota hanya dapat dilakukan secara virtual dan di rasa kurang maksimal karena ada banyak indikator untuk menjadi paripurna yang butuh pendampingan serta dukungan operasional.
2. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan hanya tercapai 86,30% dari target yang ditetapkan atau hanya mencapai 15,88% dari 18,4% yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan kurang maksimal dalam hal pembinaan dimana selama pandemi pembinaan hanya secara virtual. Selain itu memang selama 2021 dari data statistik rutin tren pelayanan KB menurun dan pencapaian peserta KB baru juga turun.
3. Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter hanya mampu mencapai 40.900 keluarga dari 44.456 keluarga yang ditargetkan atau dengan kata lain hanya mampu mencapai 92% target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter belum tercapai karena dukungan KKA untuk sasaran belum optimal. Diharapkan OPD KB Kabupaten/Kota dapat melakukan pengadaan KKA karena dukungan dari Perwakilan BKKBN DIY berupa pengadaan KKA sedikit sekali.
4. Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII) hanya mampu mencapai 78,61% atau hanya mampu mencapai 57,31 dari 72,9 yang ditargetkan. Meskipun demikian capaian tersebut adalah capaian tertinggi tingkat nasional.

Selain ketiga indikator tersebut, indikator kinerja yang lain dapat tercapai 100% bahkan lebih. Untuk capaian tertinggi ada pada indikator Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan Kategori Baik dan Baik Sekali yaitu sebesar 291,67%

- b. Program Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi
 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan DKM seluruhnya berada pada kategori baik dengan kisaran capaian sebesar 100% s.d. 121,09%.

B. REALISASI ANGGARAN

B.1. Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY

Pagu awal anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-068.01.2.017972/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp.59.829.848.000,-. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, maka selama tahun anggaran 2021 Pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta mengalami 6 kali refocusing menjadi Rp.51.558.268.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 8.271.580.000,-.

Realisasi penyerapan DIPA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta TA 2021 adalah sebesar Rp. 50.683.853.092 atau 98,30 persen dari pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA. 2021 sebesar 51.558.268.000,-. Adapun realisasi anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA 2020 per jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2021 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	39.044.145.000	38.182.412.918	97,79
2.	Belanja Barang	12.0389.443.000	12.377.237.357	99,90
3.	Belanja Modal	124.680.000	124.680.000	100,00
Jumlah		51.558.268.000	50.683.853.092	98,30

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAKPA tahun 2021

Pagu anggaran sebesar Rp. 51.558.268.000,- tersebut terbagi kedalam 2 (dua) program, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2021 per program

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN	9,802,353,000	9,793,995,520	99,91
2.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	41,755,915,000	40,890,334,755	97,93
Jumlah		51,558,268,000	50,684,330,275	98,30

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAKPA tahun 2021

- a. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2021 alokasi anggaran terserap dcukup baik meskipun belum 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran cukup digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020-2024 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

B.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program Banggakencana selain menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, juga menggunakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB melalui Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang KB, Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang KB (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dengan adanya dukungan dari DAK Sub Bidang KB tersebut sangat membantu dalam pencapaian target kinerja di DIY. Karena Anggaran APBN mengalami refocusing yang cukup besar akibat adanya Pandemi Covid 19. Sehingga beberapa kegiatan koordinasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota dibiayai melalui DAK tersebut.

Selain dukungan anggaran, pencapaian Program Bangga Kencana juga didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang ada di DIY baik ASN yang ada di Perwakilan BKKBN DIY maupun Penyuluh Keluarga Berencana. Pada tahun 2021 ini Perwakilan BKKBN DIY mempunyai pegawai sebanyak 285 orang dengan rincian ASN di Kantor Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 98 orang dan Penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 187 orang. Dengan bergabungnya tenaga Penyuluh KB di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2017 memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di DIY. Hal ini terbukti dengan adanya trend meningkatnya persentase *mCPR* dan menurunnya tingkat *unmet need* di DIY. Meskipun capaian tersebut masih belum signifikan dan masih diperlukan inovasi lebih dari para Penyuluh KB guna mencapai target kinerja yang ada sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang di DIY.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021, juga terdapat beberapa capaian lainnya yang telah dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY sampai dengan Tahun 2021. Capaian tersebut antara lain :

a. Juara Lomba – Lomba

1. Pegawai Teladan Tingkat Nasional

Salah satu cara untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan sikap dan perilaku PNS BKKBN yang berorientasi pada visi misi organisasi dan pelayanan bagi masyarakat yang memberikan dampak positif bagi BKKBN, adalah dengan memberikan penghargaan sebagai Pegawai Teladan. Pegawai Teladan merupakan PNS BKKBN dengan jabatan administrasi atau fungsional yang memenuhi kriteria pegawai teladan serta ditetapkan sebagai pegawai teladan oleh Kepala BKKBN.

Pedoman mengenai penetapan Pegawai teladan diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan BKKBN. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan penetapan Pegawai Teladan antara lain memberikan penghargaan terhadap kedisiplinan, kinerja dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai; membangkitkan motivasi, kreativitas, inovasi di antara pegawai sehingga terjadi peningkatan prestasi

kerja; menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi peningkatan prestasi kerja; dan meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai pegawai BKKBN.



Pada bulan Juni 2021, setelah melewati seleksi di tingkat Perwakilan (berupa seleksi administrasi dan seleksi polling) dan seleksi tingkat Nasional (berupa seleksi makalah serta seleksi presentasi dan wawancara), Pegawai Teladan Tingkat Nasional Tahun 2021 diraih oleh pegawai dari Perwakilan BKKBN DIY, yaitu

Rahmat Hidayat, S.Sos., MA (Widyaiswara Ahli Muda). Inovasi yang dilaksanakan oleh Rahmat Hidayat, S.Sos., MA adalah membuat “Jumat Sharing”, yaitu kegiatan berdiskusi/bertukar pengalaman/berbincang dengan pihak-pihak tertentu yang disiarkan secara online untuk menambah pengetahuan bagi seluruh pegawai Perwakilan BKKBN DIY.

2. Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)



Beberapa kegiatan telah dilakukan baik oleh BKKBN Pusat dalam hal ini Ditpenduk maupun Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai upaya intervensi dalam rangka peningkatan kualitas SSK. Salah satu yang akan dilakukan adalah penilaian bagi sekolah. Melalui lomba ini

diharapkan, dapat mendorong sekolah untuk melakukan upaya terbaik dalam rangka mencapai SSK dengan kategori paripurna sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan

peran serta Disdik dalam pengelolaan SSK, maka dalam penyelenggaraan lomba ini pula dibuka peluang untuk menyeleksi kategori Disdik terbaik dalam pengelolaan SSK.

Pada lomba tersebut DIY mampu memperoleh beberapa juara, yaitu Kategori SMP meraih Terbaik II (SMPN 2 Pakem, Sleman) Terbaik III (SMPN 2 Ngemplak, Sleman) dan Kategori SMA meraih Terbaik I (SMAN 1 Banguntapan, Bantul) dan Terbaik II (SMAN 1 Pengasih, Kulon Progo)

3. Juara 3 Nasional Lomba Keluarga Teladan



Lomba Keluarga Teladan ini diadakan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2021. Tujuan diadakannya lomba keluarga teladan adalah untuk mengapresiasi keluarga yang peduli dengan program bangga

kencana terutama dalam penerapan 8 fungsi keluarga.

Pada lomba tersebut DIY mampu meraih Juara 3 Nasional yang diwakili oleh keluarga Bapak Sufiyan Tsauri dari Kampung KB Malangrejo, Kabupaten Sleman. Keluarga tersebut terpilih dikarenakan keluarga tsb dalam kehidupannya sehari-harinya telah menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik dan telah sesuai dengan program bangga kencana di DIY. Selain itu keluarga Bapak Sufiyan Tsauri juga berperan aktif dalam pelaksanaan program bangga kencana di kampung KB tersebut sebagai Sekretaris Pokja Kampung KB dan Ketua Paguyuban Pedagang Sunmor UPPKA.

4. Juara Favorit IMP Teladan Nasional

Setiap tahun dilakukan seleksi/ penilaian/ lomba untuk mendapatkan institusi masyarakat pedesaan (IMP) secara berjenjang dari lini lapangan, kabupaten-kota, provinsi dan nasional. Kegiatan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan

Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021 dengan memberikan apresiasi kepada pelaku-pelaku Program Bangga Kencana di lini lapangan.



Kegiatan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan ini diformat dalam bentuk penilaian untuk mencari Tenaga Lini Lapangan yang terbaik dari yang terbaik. Apresiasi ini menjadi bentuk menjaga semangat dan tentu saja dapat melihat hal positif

yang sudah dilakukan tenaga lini lapangan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dari desa sampai di tingkat pusat

Bu Murjilah, Institusi Masyarakat Pedesaan Kapanewon Piyungan, berhasil menjadi Juara Favorit dalam kegiatan ini. Beliau aktif dan selalu berperan dalam menggerakkan berbagai kegiatan di wilayah Piyungan, baik tingkat dusun, desa sampai tingkat Kapanewon. Keaktifannya sebagai IMP yang selalu berupaya meningkatkan capaian Program Bangga Kencana di wilayah, seperti Program KB, Pembinaan pada PUS, calon PUS, generasi muda, Tribina, UPPKS, PIK R dan Kampung KB bahkan kegiatan sosial pembangunan lain tidak perlu diragukan lagi.

5. Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan



Tahun 2021 meskipun masih dalam situasi pandemic covid-19, namun DIY masih tetap melaksanakan kegiatan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan secara terbatas, tanpa kunjungan lapangan sehingga evaluasi dilakukan di atas meja oleh tim

Kesatuan Gerak DIY.

Pada kegiatan tersebut DIY mampu mendapatkan Nominasi ke-7 nasional yang diwakili oleh Tim Kesatuan Grak PKK Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo

6. Peringkat 1 Nasional Lomba PKBRS tipe TNI/Polri tahun 2020

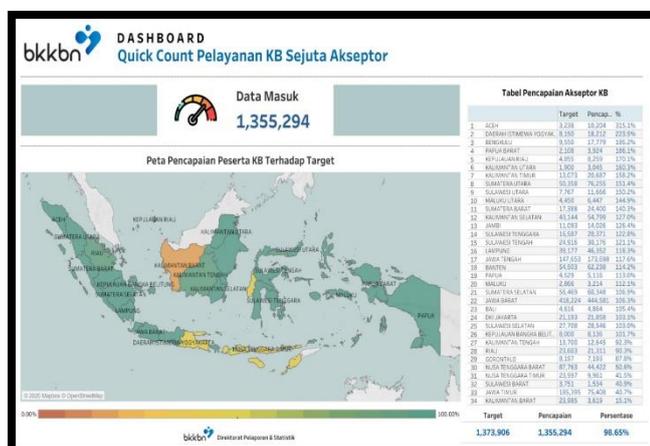
Dalam upaya merevitalisasi peran PKBRS dan meningkatkan motivasi setiap RS dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di Rumah Sakit, BKKBN melaksanakan Lomba PKBRS Tingkat Nasional tahun 2020 se-Indonesia.



Dari 3 kategori RS yang dilombakan, Perwakilan BKKBN DIY berhasil menghantarkan Juara 1 Nasional di 2 kategori yang berbeda yaitu RS. Bhayangkara Polda DIY sebagai Juara 1 Lomba PKBRS Tingkat Nasional kategori tipe

RS TNI/Polri, dan RS Rajawali Citra sebagai Juara 1 Lomba PKBRS Tingkat Nasional kategori RS tipe D. Prestasi ini sangat membanggakan dan tentunya memberi motivasi yang besar bagi Perwakilan BKKBN DIY dan Rumah Sakit mitra kerja untuk bisa selalu memberikan pelayanan KB yang terbaik bagi masyarakat.

7. Peringkat 2 Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor



Memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2020, BKKBN dalam upaya terobosannya untuk meningkatkan capaian layanan KB di masa Pandemi COVID-19 menyelenggarakan inovasi

Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Juni 2020.

Berkat koordinasi yang baik oleh Perwakilan BKKBN DIY bersama mitra kerja dan dukungan segenap masyarakat DIY, maka Perwakilan BKKBN DIY berhasil menorehkan prestasi capaian pelayanan KB dengan hasil 18.212 akseptor dari target sejumlah 8.150 akseptor (223.5%), sehingga menempatkan DIY sebagai 2 besar Nasional dalam kegiatan ini.

8. Juara 2 Kategori Kinerja Lini Lapangan dalam Adpin Award

Di era pandemi covid-19 petugas lini lapangan DIY dalam hal ini adalah PKB/PLKB sesuai tugas dan fungsinya sebagai penggerak di masyarakat dituntut untuk terus berkontribusi mendukung serta mensosialisasikan program



bangga kencana. Dalam segala keterbatasan akibat pandemi yang berkelanjutan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, PKB/PLKB Daerah Isimewa Yogyakarta berupaya mengubah pendekatan secara

konvensional menjadi pendekatan modern melalui pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial oleh PKB/PLKB diterapkan untuk mengumpulkan para kader agar dapat terjaring dalam suatu networking yang terkoordinir dan termanajemen dengan baik, sehingga informasi terkini terutama seputar perubahan perilaku di era pandemik dapat tersosialisasikan dan aplikatif. Selain mempermudah dalam mensosialisasikan program bangga kencana, penggunaan jejaring media sosial juga turut mendukung pemerintah dalam menerapkan social distancing untuk meminimalisir pertemuan.

Pada ajang Adpin Award 2020 dalam kategori kinerja lini lapangan, indikator yang termasuk sebagai bahan penilaian, yakni dokumen, dukungan, dan hasil kerja oleh para petugas lini lapangan. Kriteria penilaian pada indikator dokumen seperti tersedianya kelengkapan dokumen SK PPKBD & SUB PPKBD, SK Pokja Kampung KB, SK Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB, sedangkan kriteria penilaian pada indikator dukungan adalah besaran Dukungan Anggaran OPD Provinsi/Pemda Untuk Penggerakan Lapangan, Persentase Dukungan

Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Hubalila, Dukungan Anggaran Kab/kota terhadap pembiayaan kegiatan lini lapangan, dan pada indikator Hasil kerja terdapat sub indikator Mekanisme Operasional, Institusi Masyarakat Pedesaan, Kinerja Penyuluh KB sebagai bahan penilaian dapat dipenuhi oleh lini lapangan DIY. Dari akumulasi penilaian terhadap kriteria tersebut DIY meraih juara kedua untuk kategori ini.

9. Juara Harapan II Sistem Pencatatan Pelaporan Terbaik Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor

Dalam rangka peringatan Harganas XXVII tanggal 29 Juni 2020, BKKBN menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di seluruh wilayah Indonesia dengan tema “BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru

hadir di dalam keluargamu”, dimana pada kegiatan tersebut Perwakilan BKKBN DIY mendapat penghargaan sebagai Juara Harapan II Tingkat Nasional dalam Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB Sejuta Akseptor. Kegiatan ini turut mendorong capaian kesertaan KB Baru maupun KB Aktif.



Sesuai dengan harapan, melalui pelayanan serentak yang dilaksanakan ini berdampak pada peningkatan capaian peserta KB baru dan peserta KB aktif dapat dipertahankan atau dengan kata lain tingkat putus pakai kontrasepsi dapat diminimalisir. Mengingat pada situasi pandemi Covid-19 belakangan, angka kesertaan KB ulang sempat mengalami penurunan yang signifikan.

Pencatatan pelaporan yang dilakukan oleh Perwakilan DIY menunjukkan adanya ketepatan dan kecepatan sehingga antara data hasil pelayanan KB serentak pada tanggal 29 Juni 2020 terekam dalam sistem informasi manajemen pelaporan yang ada. Sehingga kontrol terhadap akseptor yang dilayani dan jenis kontrasepsinya dapat termonitor dengan sesuai.

b. Penghargaan

1. Akreditasi “A” Bidang Latbang

Proses Akreditasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan lembaga diklat dalam menyelenggarakan Diklat



Teknis dan Fungsional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 10 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang

Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana (Pusdiklat KKB) BKKBN sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Pusdiklat KKB mempunyai kewenangan mengakreditasi Lembaga Diklat yang berada dibawahnya (Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi) dalam hal penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kependudukan dan KB.

Pada tahun 2020, Pusdiklat KKB telah melaksanakan Akreditasi pada 13 Bidang Latbang Provinsi. Ke 13 Latbang Provinsi tersebut yaitu : Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta. Serangkaian kegiatan yang dimulai dari sosialisasi, pemeriksaan dan penilaian dokumen, visitasi serta sidang penentuan status akreditasi sampai dengan penyerahan sertifikat akreditasi. Dengan hasil akreditasi tersebut, Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi DIY terakreditasi A memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional.

2. Provinsi Tercepat Mendata



Pendataan Keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh

masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Pendataan Keluarga Tahun 2021 di dilaksanakan secara serentak secara Nasional pada tanggal 1 April s.d. 31 Mei 2021. Dalam Launching Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) oleh Kepala BKKBN pada tanggal 4 November 2021, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Penghargaan PK21 dalam Kategori Provinsi Tercepat dalam Pendataan Keluarga.

3. PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi "Informatif" Tahun 2021

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi BKKBN kepada Pejabat Pengelola



Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Perwakilan Provinsi, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Predikat Pelaksana Perwakilan Provinsi "Informatif" dengan nilai 100, dalam Implementasi Undang Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penganugerahan ini disampaikan oleh Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) pada tanggal 15 November 2021.

4. Wira Karya Kencana

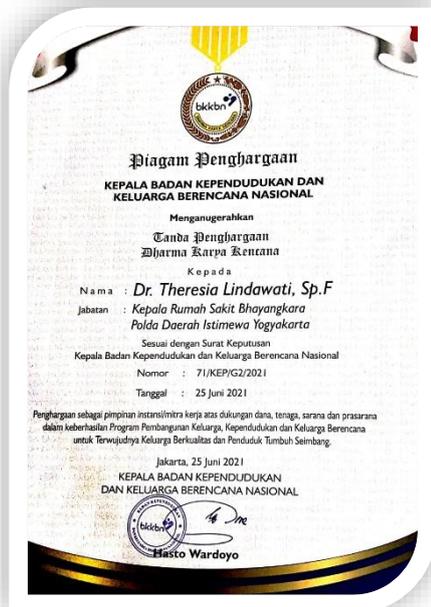


Penghargaan tertinggi di bidang Bangsa Kencana dari Kepala BKKBN RI yang diberikan kepada perorangan sebagai tenaga profesi, yang memberikan komitmen, dukungan serta dharma baktinya secara nyata dalam pelaksanaan Program Bangsa Kencana, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

Pada Tahun 2021 penghargaan ini diberikan kepada **dr. Sakti Ronggowardhana B, Sp.U (K)** atas jasanya yang turut menyukseskan program keluarga berencana di DIY,

yaitu sebagai provider KB MOP di RSUP dr. Sardjito.

5. Dharma Karya Kencana



Penghargaan tertinggi di bidang bangga kencana dari Kepala BKKBN RI yang diberikan kepada pimpinan institusi/mitra kerja yang memberikan komitmen, dukungan serta dharma baktinya melalui penyediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan Program Bangsa Kencana, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

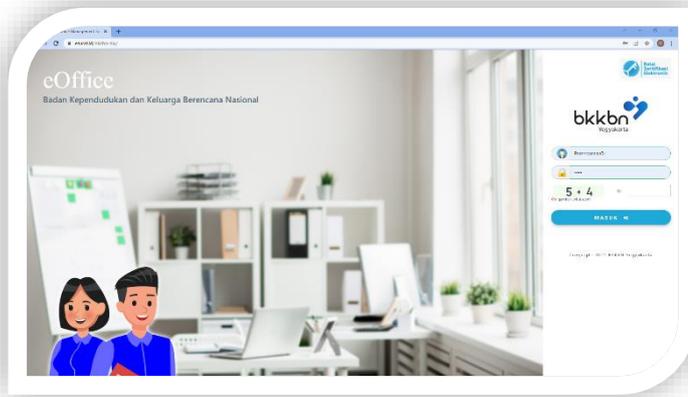
Pada tahun 2021 penghargaan ini diberikan kepada **dr. Theresia Lindawati, Sp. F** sebagai Kepala

Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY atas partisipasi dan dukungan rumah sakit tersebut dalam menyukseskan program bangga kencana di DIY melalui berbagai bhaksos pelayanan KB yang diadakan.

c. Inovasi

1. Aplikasi *Digital Office*

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 6



tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, maka Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menerapkan Aplikasi Digital Office dalam kegiatan operasional administrasi persuratan. Aplikasi ini berbasis Web dan tersedia dalam versi mobile pada smart phone yang dapat dipergunakan dan diakses kapanpun serta dimanapun. Aplikasi ini mendukung program *Go Green* dimana kegiatan operasional administrasi persuratan yang sebelumnya secara manual dengan menggunakan kertas mulai ditinggalkan.

Fungsi-fungsi pada aplikasi ini antara lain adalah :

- 1) Fungsi Disposisi Surat Masuk dan Monitoring Disposisi Tersebut
- 2) Fungsi Pembuatan dan *Approval* Surat
- 3) Fungsi Pembuatan, *Approval* dan Distribusi Surat Tugas
- 4) Fungsi Agenda pada *Google Calender Smartphone*

2. Inovasi Penurunan Stunting

a. Program Bayi Hebat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerjasama dengan Roraty Club Mayaram Yogyakarta meluncurkan Great Babies Program (Program Bayi Hebat) di Dusun Bekelan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,

Kabupaten Bantul, DIY, Senin (14/6) pagi. Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN, dokter Hasto Wardoyo. Detil program Great Babies, penerima program akan menerima 'Kartu Bayi Hebat' yang menjadi pegangan bagi petugas lapangan dalam memantau kebutuhan spesifik si bayi. Pemberian bantuan pangan tidak akan sama antara bayi satu dan bayi yang lain melainkan disesuaikan dengan kebutuhan pemegang kartu.

Program ini memastikan hingga si bayi melalui tahun pertama dan tahun kedua dengan sehat dan terbebas dari stunting, selanjutnya persis pada ulang tahun kedua si bayi akan mendapat piagam penghargaan dan hadiah manisan edikasi sebagai bayi hebat yang mampu melalui 1000 Hari Pertam Kehidupan (HPK) dengan sehat dan tidak stunting.

b. Mahasiswa Peduli Stunting

Salah satu kerjasama yang potensial dalam penanganan stunting adalah dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi, untuk menempatkan para mahasiswa melakukan aktualisasi keilmuannya di masyarakat. Oleh karena itu, teretuslah Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting). Pada prinsipnya, Mahasiswa Penting adalah kolaborasi antara program pendampingan kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik yang telah secara reguler dilaksanakan, dengan Program Kampus Merdeka. Peluncuran Program Mahasiswa Peduli Stunting diselenggarakan secara virtual dan secara luring di Ruang Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY pada 24 September 2021. Program itu merupakan bentuk pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.

c. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)

Untuk menurunkan angka stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY melaunching program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Dashat yang tersebar sampai tingkat kampung atau desa ini menjadi upaya menjaga gizi dan nutrisi bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui, sampai perempuan yang hendak menikah.

Dalam hal logistik, ada tiga model penyediaan makanan. Pertama menyediakan makanan lokal secara gratis. Pemberian makanan langsung pada sasaran. Model kedua kombinasi antara penyediaan makanan lokal

secara gratis serta penjualan. Sementara model ketiga secara komersial atau penjualan secara total. Perwakilan BKKBN DIY menggandeng Aksi Cepat Tanggap (ACT) DIY meluncurkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, 30 November 2021

Program yang di launching secara virtual oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo ini diikuti dengan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) DIY dan juga PT. Boga Perkasa Sejahtera (BPS) sebagai wujud dukungan penuh untuk menyukseskan program DASHAT.

3. Vaksinisasi Keluarga

Kegiatan vaksinasi keluarga merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden kepada BKKBN untuk mencegah Covid-19 pada ibu hamil dan melahirkan, balita dan anak-anak 12-17 tahun. Dengan melakukan kegiatan "Vaksinasi Sak Omah" dipandang sangat tepat karena mengindikasikan ajakan agar seluruh anggota keluarga menerima dan melaksanakan vaksinasi. Petugas pelaksana vaksin ini terdiri dari tenaga kesehatan. Untuk bidan pelaksana vaksinasi ini sebelumnya sudah mengikuti workshop tatalaksana vaksinasi covid-19 bagi Bidan yang diselenggarakan oleh BKKBN dan Kementerian Kesehatan dan sudah memiliki sertifikat sebagai vaksinator. Kegiatan "Vaksinasi Sak Omah" ini merupakan sinergitas antara Pemerintah, Swasta dan didukung TNI-POLRI sehingga akan memperkuat komitmen percepatan vaksinasi dan diharapkan dengan cakupan vaksinasi yang semakin meningkat maka akan terbentuk herd immunity khususnya bagi warga DIY sehingga kegiatan masyarakat bisa pulih seperti sebelumnya. Pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan "Vaksinasi Sak Omah" antara lain Perguruan Tinggi, Ciputra Group/Barsa City Yogyakarta, Peduli Anak Istimewa, WIKA dan Margaria.

4. Sekolah Lansia Kelompok BKL

Pada tahun 2020, sekolah lansia masih berjalan dan bertambah 2 (dua) sekolah lansia lagi yaitu : Sekolah Lansia BKL Manunggal Asih dari Kabupaten Gunungkidul dan Sekolah Lansia BKL Melati dari Kabupaten

Kulonprogo. Sekolah Lansia terselenggara atas kerja sama antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Yayasan IRL (Indonesia Ramah Lansia).



Tepat pada tanggal 02 Desember 2020, 3 (tiga) sekolah lansia berhasil menyelenggarakan wisuda sebagai tanda kelulusan sekolah lansia untuk jenjang

“Standar-1”. Dan sebagai Dewan Prosesi dalam wisuda sekolah lansia kelompok BKL adalah Wakil Gubernur DIY, Kepala Perwakilan BKKBN DIY dan Direktur Indonesia Ramah Lansia.

Dalam arahnya, beliau berharap semoga dengan wisuda ini bisa meningkatkan kualitas lansia dan mampu mewujudkan lansia tangguh di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang diharapkan kita bersama. Para wisudawan juga diharapkan meningkatkan kemampuan untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya, karena menuntut ilmu bisa kita peroleh dari ayunan sampai usia sepuh atau akhir hayatnya.

5. Jumat Sharing

Sebagai upaya agar pegawai dapat terus menambah wawasan dan keterampilannya, Perwakilan BKKBN DIY melalui bidang pelatihan dan pengembangan (Latbang) menyelenggarakan Jumat Sharing. Jumat sharing merupakan sarana berbagi ilmu dan pengalaman melalui aktivitas belajar bersama secara rutin dari, oleh, dan untuk pegawai. Kegiatan yang dikemas secara informal ini dilaksanakan dua kali setiap bulan setelah kegiatan senam pagi. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring.

Jumat Sharing diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi rintisan fasilitasi kebutuhan pelatihan pegawai sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menyerap aspirasi kebutuhan pelatihan pegawai sekaligus sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan peningkatan kompetensi.

D. EVALUASI KINERJA

1) Review Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024

Di dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan di capai selama 5 tahun kedepan dalam Program Bangga Kencana. Penetapan sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun sudah berdasarkan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat, karena Perwakilan BKKBN DIY sebagai unit pelaksana program Bangga Kencana di daerah. Penetapan target tahun 2020-2024 tersebut sudah menyesuaikan kondisi DIY dengan berdasarkan data dan capaian program Bangga Kencana di tahun 2019.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 perlu dilakukan review renstra Perwakilan BKKBN DIY secara berkala. Akan tetapi review renstra belum dilakukan karena menunggu review renstra BKKBN yang sampai saat ini belum dilaksanakan juga. Dengan melihat capaian program dan kinerja Perwakilan BKKBN DIY selama dua tahun ini, tahun 2020 dan 2021 perlu dilakukan review renstra Perwakilan BKKBN DIY, apalagi dengan kondisi pandemic Covid 19 yang belum selesai sampai tahun ke tiga (2022) dari renstra. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY, seperti target Indikator Kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmet Need*).

2) Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2021 kinerja Perwakilan BKKBN DIY berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2021 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 5 aspek, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Dari indikator kinerja yang ada pada Renstra kemudian disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Dimana Rencana Kerja Tahunan

tersebut digunakan sebagai Struktur Program dan Anggaran (SPA) untuk menyusun program dan anggaran serta kegiatan tahun 2021 yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2021. Perwakilan BKKBN juga telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) tahun 2021 berdasarkan pada DIPA yang telah disusun.

b. Perjanjian Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY mendapat indikator dan target kinerja dari BKKBN Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19. Dari target kinerja yang ada setelah dilakukan review terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi riil di DIY, yaitu pada indikator Persentasi Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2021 baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra. Selain itu juga membandingkan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah (target tahun 2024) dan juga pengukuran trend capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data capaian yang digunakan untuk pengukuran bersumber dari Puslitbang BKKBN, Statistik Rutin dan SMART.

Dari pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan analisis hasil capaian kinerja, hanya 1 (satu) indikator yang masih dalam capaian merah. Sedangkan untuk indikator lainnya tercapai dengan capaian diatas 90%.

d. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas. E-Monev merupakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dari 19 RO yang dilaporkan pada e- Monev Perwakilan BKKBN DIY Tahun Anggaran 2021, sebanyak 11 RO, capaian realisasinya telah mencapai 100%, sedangkan sisanya rata-rata hampir menyentuh 100% yaitu di angka 99%.

e. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perencanaan hingga laporan kinerja yang telah dilakukan maka kinerja Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2021 bisa dikatakan cukup optimal. Perwakilan BKKBN DIY dapat mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan baik pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 maupun Renstra. Selain itu Perwakilan BKKBN DIY juga mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pasca *refocusing* dengan penyerapan anggaran diatas 98% pada anggaran Program Bangga Kencana.

3) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berdasarkan hasil penilaian Tim Internal ZI menuju WBK, telah memenuhi nilai minimum pada setiap area perubahan, sebagaimana disampaikan pada table berikut :

Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2021

NO	AREA PERUBAHAN	NILAI	NILAI MINIMUM
1.	Manajemen Perubahan	7,41	5,36
2.	Penataan Tata Laksana	7,00	4,69
3.	Penguatan Sistem Manajemen SDM	10,00	6,70
4.	Penguatan Akuntabilitas	8,33	6,70
5.	Penguatan Pengawasan	14,06	10,05
6.	Penguatan Pelayanan Publik	9,20	6,70
TOTAL PENGUNGKIT		56,00	40,20
1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	14,14	13,50
2.	Presentase Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5,00	5,00
3.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	18,10	16,50
Total Area Hasil		37,24	35,00
Total		93,24	75,20

Sumber : Hasil penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2021

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perwakilan BKKBN DIY lulus dan layak untuk diajukan sebagai unit kerja berpredikat “Menuju WBK” di lingkungan BKKBN kepada Tim Penilai Nasional/Kementerian PAN dan RB RI Tahun 2021.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pembangunan Zona Integritas di Perwakilan BKKBN DIY dimulai dengan adanya deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan. Sebagian besar pegawai di Perwakilan BKKBN DIY juga telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Komitmen pimpinan juga diwujudkan dengan ditetapkannya SK Kepala Perwakilan BKKBN DIY Nomor 352/HK. 010/J1/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Perwakilan BKKBN DIY.

Selain itu pada 10 Februari 2021 juga telah dilakukan Pembinaan Pegawai tentang Implementasi SPIP dan Pembangunan ZI-WBK Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

Tahun 2021 Perwakilan BKKBN DIY masuk dalam 1 dari 57 Unit Kerja yang diusulkan BKKBN ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi untuk mendapatkan Predikat WBK dan WBBM. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021, dilaksanakan Evaluasi Zona Integritas Perwakilan BKKBN DIY oleh Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

4) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perwakilan BKKBN DIY menunjukkan trend yang positif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun hasil penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY

NO	URAIAN	BOBOT	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,04	24,66	24,93
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	12,18	14,38	16,88
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,87	11,00	13,98
4.	Evaluasi Kinerja	10,00	6,54	6,88	6,75
5.	Capaian Kinerja	20,00	11,5	13,54	11,04
TOTAL		100,00	63,15	70,45	73,58
PREDIKAT			B	BB	BB

Dari tabel diatas dapat terlihat dari tahun 2018 nilai SAKIP DIY mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP di Perwakilan BKKBN DIY telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian perlu dilakukan strategi yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun selanjutnya, karena sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020, untuk komponen evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada pertengahan Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi capaian kinerja terkait Indikator Kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) yang masih jauh dari target dan telah dilakukan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sesuai dengan harapan, walaupun pada hasil akhir Indikator kinerja tersebut tidak tercapai. Begitu juga dengan indikator kinerja yang lain juga telah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sehingga dilakukan strategi baru agar kinerja Perwakilan BKKBN DIY dapat tercapai indikator.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2021.

A. Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 yang masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan rentang pencapaian antara 91,03% s.d. 143,13% adalah :
 - 1) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
 - 2) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19)
 - 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
 - 4) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun
 - 5) Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)
 - 6) Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi
 - 7) Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Penelitian Program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional

- 8) Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
 - 9) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
 - 10) Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
 - 11) Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 12) Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan
 - 13) Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang masuk dalam kategori **Baik {Biru}** dengan pencapaian sebesar 89,10% adalah Angka Prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*)
 3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 yang masuk dalam kategori **Kurang {Merah}** adalah Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*).

A. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Shodiqin
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 4 November 2021
Pihak Pertama,

Shodiqin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,9 Rata-rata anak per wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	62,4%
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,62%
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,07 (Skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23 tahun
7	Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan penelitian dan pengembangan	1	Jumlah Penelitian dan Pengembangan program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)	1 makalah
		2	Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	1 jurnal
		3	Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	1 jurnal
8	Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	51.768 keluarga
9	Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422 PIK Remaja dan BKR
10	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 Kelompok BKL
11	Meningkatnya fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan	1	Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5 Kampung KB Percontohan
12	Meningkatnya fasilitas pembinaan Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB Percontohan	1	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan yang mendapat fasilitas pembinaan	1 Kampung KB Percontohan Provinsi & 5 Kampung KB Percontohan Kab/Kota
13	Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	235 Faskes

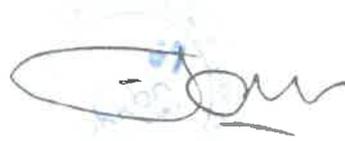
NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
1	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	1	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	24.414.000
		2	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	40.474.000
		3	Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	59.749.000
		4	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE, serta penyediaan data dan informasi keluarga	208.433.000
		5	Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	6.341.389.000
		6	SDM (internal dan eksternal) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	91.187.000
		7	Rekomendasi kebijakan hasil Penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana	51.200.000
		8	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	503.389.000
		9	Tim Pendamping Keluarga yang mendapatkan paket data	555.600.000
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	81.070.000
		2	Layanan Perkantoran	41.482.405.000
		3	Layanan Sarana Internal	124.680.000
		4	Layanan Prasarana Internal	
		5	Laporan Pengawasan Internal	67.760.000
2	Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)	1	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	59.589.000
		2	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	203.795.000
		3	Kelompok BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	32.385.000
		4	Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	67.142.000
		5	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan	74.350.000
		6	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	1.489.257.000
		TOTAL ANGGARAN		

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 4 November 2021
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Shodiqin

Unit Kerja	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Situan	Penilaian Delimitasi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	Sumber Data Indikator Kinerja	Keterangan
6.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Tahun	Umur dipapir dan siswa yang tidak terlempok umur 10-49 tahun kedua jenis	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$ <p> Keterangan: M_t = nilai median X₁ = batas bawah dari P untuk kelompok umur X₀ = batas atas dari P untuk kelompok umur F(X₁) = frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median F(X₀) = frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median J = interval antar kelas </p>	Tahunan	Penelitian dan Pengumpulan Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
7.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Maksimal	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
8.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
9.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
10.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
11.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
12.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)
13.	Menyampaikan Media dan Data Keagenan Perencanaan	Mendukung dan Swasembada Perencanaan (MURP)	Berkas	Kemampuan penelitian dan pengumpulan data keagenan perencana yang akurat dan valid	$M_t = \bar{X}_1 + \left(\frac{F(X_1) - F(X_0)}{F(X_1) - F(X_0)} \right) J$	Tahunan	Data Keagenan Perencanaan	Pendidikan keluarga dan :DOKI dalam rumah 5 tahun umur (0-100%) (GDPK) (GDPK) (GDPK)

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2021

DI Yogyakarta

Perwakilan BKKBN Provinsi : Di Yogyakarta

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI			59.829.848,000	
068.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			11,611,927,000	
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			11,611,927,000	
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			1,743,610,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.001	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	4	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	133,000,000	
	1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	4	Kab/Kota		
	171 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	4	Kab/Kota	74,000,000	
	a Internalisasi Materi dan Media KIE Program BKB				
	b Pengembangan Media dan Materi KIE sesuai dengan kearifan lokal				
	c Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Program BKB				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	172 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	1	PPKS	59,000,000	
	a Penguatan pengelolaan PPKS Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai layanan publik				
	b Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan				
	c Dukungan sarana bagi PPKS di Balai Penyuluhan				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				
3331.QDE.001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	51,768	Keluarga	321,169,000	
	2.1 Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	51,768	Keluarga		
	173 Promosi dan KIE 1000 HPK	5	Kab/Kota	289,043,000	
	a Advokasi kepada pemangku kebijakan daerah tentang promosi				
	b Peningkatan Kapasitas pengelola Pro-PN				
	c Internalisasi pengasuhan 1000 HPK				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	174 Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK	1	Laporan	32,116,000	
	a Monitoring dan Evaluasi Promosi dan KIE 1000 HPK				
	b Pelaporan data Pro-PN Promosi dan KIE melalui SIGA, SMART, dan Pelaksanaan Kegiatan Pro-PN				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	Kelompok Masyarakat	1,078,701,000	
	3.1 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	PIK Remaja dan BKR		
	175 Fasilitasi dan Pembinaan GenRe (PIK Remaja) dan BKR di Kab Kota	4	Kab/Kota Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan GenRe	294,000,000	
	a Workshop Parenting 1001 Cara Bicara tingkat Provinsi				OPD, IPeKB Kab/Kota, PKB Pembina Lokus, dan Kader BKR Lokus Pro PN
	b Workshop "Tentang Kita" bagi Pengelola PIK Remaja tingkat Provinsi				OPD, Forum Genre Kab/Kota, IPeKB Kab/Kota, PKB Pembina Lokus, dan Pengurus/PSKS PIK R Lokus Pro PN
	c Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Krealifitas Genre				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	176 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	422	Jumlah PIK Remaja dan BKR Yang mendapat fasilitasi pembinaan	784,701,000	
	a Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				- Pemenuhan Media 1001 Cara Bicara untuk BKR untuk Lokus Pro PN - Pemenuhan Modul dan Media Edukasi Tentang Kita untuk PIK R Lokus Pro PN - Pembinaan pada BKR dan PIK R Lokus Pro PN - memfasilitasi Kegiatan Forum Genre Provinsi/Kab/Kota
	b Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis				- Hari Remaja - Harganas
	c Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				- Pelaporan Rutin - Pelaporan Ouput melalui aplikasi SMART - Melaporkan melalui SIGA
	d Apresiasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				- Memberikan Apresiasi terhadap PIK R dan BKR yang melaksanakan kegiatan PKBR sesuai dengan Panduan Pro PN berdasarkan hasil Monev
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
3331.QDD.002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	Kelompok Masyarakat	110,750,000	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
4.1	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	Kelompok BKL		
177	Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	143	Kelompok BKL	110,750,000	
a	Perbanyak materi dan media KIE kelanjutusiaan				
b	Sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh bagi kader BKL				
c	Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia				
d	Koordinasi dan integrasi keterpaduan program				
e	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
3331.QDD.003	Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	Kelompok Masyarakat	100,000,000	
6.1	Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	Kampung KB Percontohan		
178	Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan	5	Kampung KB Percontohan	100,000,000	
a	Perbanyak materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
b	Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor				
c	Fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor				
d	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN Provinsi				290,893,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.002	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	168,708,000	
1.1	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1	Kab/Kota		
179	Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	5	Kab/Kota	40,212,000	
a	Sosialisasi Blue Print Pembangunan Kependudukan			30,000,000	
b	Workshop pengolahan data dan analisis pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 Pilar				
c	Workshop penyusunan GDPK 5 Pilar (pembentukan tim koordinasi penyusunan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar, penyusunan rencana anggaran dan kegiatan)				
d	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
180	Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota	Provinsi dan Kab/Kota	8,412,000	
a	Fasilitasi koordinasi satu data kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
b	Workshop pemanfaatan GDPK 5 Pilar dalam perencanaan pembangunan (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
c	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
181	Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota	Provinsi dan Kab/Kota	8,506,000	
a	Workshop penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan untuk pemerintah daerah				
b	Tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan pembangunan bidang kependudukan program Bangsa Kencana				
c	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
182	Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	82	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi	8,000,000	
a	Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan				
b	Pengelolaan data Kampung KB (Profil Kampung KB)				
c	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
183	Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan	67	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	13,500,000	
a	Fasilitasi teknis manajemen data pada Rumah Data Kependudukan				
b	Penguatan sistem tata kelola Rumah Data Kependudukan berbasis teknologi informasi (Pro PN)				
c	Fasilitasi pengintegrasian data basis Rumah Data Kependudukan pada Sistem Manajemen Data Desa (Pro PN)				
d	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
184	Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	1 prov & 0 kab/kota	Pemda Provinsi & Kab/Kota	9,000,000	
a	Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangsa Kencana				
b	Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangsa Kencana				
c	Impelementasi sistem monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Bangsa Kencana yang efektif				
d	Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
185	Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)	1 prov & 1 kab/kota	Pemda Provinsi & Kab/Kota	11,256,000	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	a Sosialisasi dan fasilitasi pedoman umum/juklak kepada pemda (opd kb) dan petugas KKBPK				
	b Pembentukan pelaksanaan pendidikan kependudukan (satuan pendidikan formal, non formal dan informal)				
	c Pengembangan materi pendidikan kependudukan sesuai isu				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	186 Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	1	Kab/Kota	41.916.000	
	a Workshop Perumusan Isu tentang Pengendalian Penduduk di Provinsi				
	b Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kependudukan				
	c Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan di Kabupaten/Kota				
	d Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota				
	e Seminar Hasil ADK di Tingkat Provinsi				
	f Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
	g Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	187 Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB	3	Pemerintah Daerah Kab/Kota	27.906.000	
	a Workshop Perumusan Isu Kependudukan di Kampung KB				
	b Penguatan Lintas Sektor dan mitra kerja tentang Pengelolaan Kampung KB Tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
	c Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Kerja dalam Pertemuan Nasional Program KKBPK				
	d Penguatan dan Bimbingan Teknis Program KKBPK di Kampung KB				
	e Pengembangan Pengelolaan Kampung KB Percontohan				
	f Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi bersama mitra kerja				
	g Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pengelolaan Kampung KB				
	h Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
3331.QDD.004	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan	1 prov & 5 kab/kota	Kelompok Masyarakat	122.185.000	
	2.1 Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan	1 prov & 5 kab/kota	Kampung KB Percontohan Provinsi dan kab/kota		
	188 Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	6	Kampung KB Percontohan	122.185.000	
	a Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan				
	b Pengembangan Sistem Rumah Data Kependudukan berbasis Teknologi Informasi				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi			1.849.898.000	
3331.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
3331.BDB.001	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	171	Lembaga	185.100.000	
	1.1 Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	171	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
	189 Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di faskes	1	Dokumen	12.000.000	
	a Penguatan Pelayanan KB di Faskes				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	190 Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	219	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	15.500.000	
	a Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi				
	b Fasilitasi Peningkatan Standarisasi Tenaga Kesehatan				
	c Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB Melalui Tim Jaga Mutu				
	d Penguatan Koordinasi Tenaga Kesehatan Pelayanan KB bersama Mitra Kerja				
	e Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi				
	f Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	191 Penyerasian Kebijakan dan Penguatan Program Pelayanan KB Pria	1	Dokumen	12.000.000	
	a Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria bersama Mitra Kerja				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	192 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	5	Kab/Kota	19.000.000	
	a Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di tiap kabupaten dan kota				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	193 Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota	1	Dokumen	12.000.000	
	a Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	194 Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan Implan serta Komplikasi dan Kegagalan	5	Kab/Kota	17.600.000	
	a Koordinasi dan evaluasi penggerakan MKJP di Kab/Kota				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
195	Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Galciltas	3	Mitra Kerja (Kumulatif)	32,000,000	
	a Integrasi Penguatan Kemitraan dalam Rangka Penggarapan KB dan KR di wilayah dan sasaran khusus pada Kegiatan Momentum				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
196	Peningkatan implementasi penggerakan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi wilayah Risiko tinggi	2	kab/kota	12,000,000	
	a Penguatan Kespro Remaja Melalui Ajang Kreatifitas di Komunitas Remaja di Tingkat Provinsi				
	b Penguatan Informasi Kespro untuk Komunitas Risiko Tinggi di Era Milenial				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
197	Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK	2	kab/kota	23,000,000	
	a Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
198	Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	6	Mitra	30,000,000	
	a Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi Pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QEI	Bantuan Lembaga				
3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	235	Lembaga	1,664,798,000	
1.1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	235	Faskes		
199	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon)	2	Dokumen	1,664,798,000	
	a Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon				
	b Pengadaan Alokon				
	IUD (set)	0	set		
	Implan 2 batang (set)	3,590	set		
	Implan 1 batang (set)	359	set		
	Obat Suntik KB Tiga Bulanan 1 ml (vial)	6,392	vial		
	Obat Suntik KB Kombinasi 1 ml (vial)	1,598	vial		
	Pil Progeslin (cycle)	17,484	cycle		
	Pil KB Kombinasi (Cycle)	99,600	cycle		
	Kondom (lusin)	57,036	lusin		
	c Syringe	7,990	buah		
	d BMHP Implan	3,949	set		Provinsi yang mengadakan Implan
	e Administrasi Pengadaan alokon				
	f Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi				7,480,350,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE, serta penyediaan data dan informasi keluarga	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	609,736,000	
1.1	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat, serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	1	Pemda Provinsi		
200	Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangsa Kencana	16	jumlah mitra aktif	50,000,000	
	a Penilaian Penghargaan Bidang Bangsa Kencana bagi Mitra Kerja dalam rangka HARGANAS				
	b Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif Provinsi/Kabupaten/Kota ke BKKBN Provinsi				
	c Fasilitasi Pelaksanaan TMKK di Provinsi				
	d Penguatan IT Kemitraan untuk Kelangsungan Program di provinsi				
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
201	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Program Bangsa Kencana	8	jumlah mitra aktif	50,000,000	
	a Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan Tingkat daerah provinsi				
	b Pertemuan Mitra Kerja Program Bangsa Kencana di provinsi				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
202	Peningkatan Kelembagaan pada Kab/Kota yang memiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang utuh	2	Kab/Kota	50,000,000	
	a Pemetaan rencana aksi peningkatan kelembagaan pada Kab/Kota tingkat provinsi				
	b Temu kerja dinas bidang pengendalian penduduk dan KB tingkat provinsi				
	c Pemantauan berkala dalam peningkatan kelembagaan pada Kab/Kota tingkat provinsi				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
203	Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	0	Provinsi	-	
	a Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program Bangsa Kencana berdasarkan Segmentasi Sasaran dan Wilayah				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
204	Peningkatan Advokasi Program Bangsa Kencana melalui Tenaga Lini Lapangan dan Kegiatan Momentum	0	Provinsi	-	
	a Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum Internasional dan Nasional				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	b Sosialisasi dan Advokasi Program Bangga Kencana melalui Tenaga Lini Lapangan				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
205	Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Online serta Media Luar Ruang	3	Frekuensi	30,000,000	
	a Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Sosial				
	b Sosialisasi Pelaksanaan Hari Keluarga				
	c Produksi Multi Media dan Pendayagunaan MPC				
	d Sosialisasi dan Promosi KIE Program Bangga Kencana melalui Media Luar Ruang				
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
206	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	20	Kegiatan	50,000,000	
	a Advokasi Program Bangga Kencana Berbasis Bukti (Pendampingan Pokja Advokasi)				
	b Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja				
	c Advokasi Program Bangga Kencana Melalui Media Elektronik				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
207	Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB	12	Dokumen	50,000,000	
	a Pembinaan dan Laporan Kinerja Penyuluh KB/PLKB				
	b Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB				
	c Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB				
	d Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh KB/PLKB				
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
208	Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	3,235	PPKBD/ Sub PPKBD	50,000,000	
	a Penguatan Kualifikasi IMP melalui Si LiLi Keren				
	b Apresiasi Tenaga Lini Lapangan berPrestasi Tingkat Provinsi				
	c Penguatan IMP melalui Workshop APDESI				
	d Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan				
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
209	Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	20	MEKOP	50,000,000	
	a Fasilitasi Pembinaan Sistem Mekanisme Operasional Lini Lapangan				
	b Fasilitasi pengelolaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
210	Penguatan tupoksi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB	223	Orang	50,000,000	
	a Fasilitasi Penguatan Sasaran Kinerja Penurunan DO bagi Penyuluh KB/PLKB				
	b Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Budaya Kerja Penyuluh KB/PLKB				
	c Fasilitasi Koordinasi Percepatan Kinerja Penurunan DO bagi Pengurus IPeKB				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
211	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi data dan informasi Program Bangga Kencana	5	Kab/Kota	5,325,000	
	a Penilaian dan Verifikasi Kualitas Data Rutin				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
212	Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan jaringan STIK program Bangga Kencana	1 Prov 5 Kab/kota	Kab/Kota	124,411,000	
	a Penguatan Sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi dan komunikasi				
	b Koordinasi Teknis Sistem Teknologi Informasi Program Bangga Kencana				
	c Sosialisasi dan evaluasi SPBE STIK BKKBN tingkat Prov.				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
213	Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi, Dokumentasi dan pengelolaan PPID	5	Kab/Kota	50,000,000	
	a Penyebarluasan Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media Elektronik				
	b Pengelolaan Perpustakaan				
	c Sosialisasi Penggunaan Aplikasi dan Program Bangga Kencana TK. Provinsi				
	d Evaluasi Pemanfaatan Penyebarluasan Informasi Program Bangga Kencana				
	e Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.BMA	Data dan Informasi Publik				
3331.BMA.001	Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	1	Layanan	6,870,614,000	
1.1	Jumlah Layanan Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	1	Layanan		
214	Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi program Bangga Kencana	5	Kab/Kota	6,870,614,000	
	a Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (Registrasi SIGA)			77,286,000	
	b Pengadaan Formulir Pendataan Keluarga	333,425	Keluarga		
	c Operasional Pendataan menggunakan Smartphone	777,992	Keluarga		
	d Orientasi Pendataan Keluarga (2 hari)				
	- Tk. Provinsi	5	Kab/Kota		
	- Tk. Kabupaten/Kota	78	Kecamatan		
	- Tk. Kecamatan	438	Desa/Kelurahan		
	- Tk. Desa/Kelurahan	7,409	Kader		
	e Operasional Pendataan	333,425	Keluarga		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	Supervisor	438	Desa/Kelurahan		
	Manager	438	Desa/Kelurahan		
	Manager	78	Kecamatan		
	f <u>Monitoring /Pengamatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (Perjalanan)</u>				
	- Dari Prov Ke Kabupaten/Kota s/d Desa/Kelurahan	30	OH		
	g <u>Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga (Perjalanan)</u>				
	- Dari Prov Ke Kabupaten/Kota s/d Desa/Kelurahan	30	OH		Operasional Lapangan PK21
	h <u>Jasa Pengolahan (Perekaman Data Keluarga)</u>	333,425	Keluarga		
	Data Manajer	78	Kecamatan		
	i <u>Sarasehan /Penyajian Hasil Pendataan Keluarga</u>				
	- Tk. Provinsi	1	Keg		
	- Tk. Kabupaten/Kota	5	Keg		
	- Tk. Kecamatan	78	Keg		
	- Tk. Desa/Kelurahan	438	Keg		
	j <u>Sosialisasi dan Publikasi Pendataan Keluarga</u>				
	- Tk. Provinsi	1	Keg		
	- Tk. Kabupaten/Kota	5	Keg		
	k <u>Pengadaan Output Data Keluarga (R1/BDKI/21)</u>	38,255	RT		
	l <u>Pengadaan PK KIT</u>	7,409	Kader		
	m <u>Sinkronisasi PK2021 ke dalam SIGA</u>	5	Kab/kota		
	n <u>Pengadaan Buku Saku PK2021</u>	7,409	Kader		
	o <u>Sosialisasi Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangsa Kencana Bersama Mitra</u>	0	Paket		
Bidang Lalitbang	Perwakilan BKKBN Provinsi			247,176,000	
3331.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial				
3331.DCJ.001	<i>SDM (internal dan eksternal) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota</i>	154	Orang	157,176,000	
	1.1 Jumlah SDM (internal dan eksternal) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	154	Orang		
	215 Pelatihan bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi	118	Orang	36,600,000	
	a Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK bagi PKB (PNS)	6			
	b Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPB bagi PKB/PLKB PNS	112			
	216 Pelatihan Teknis Program Bangsa Kencana	35	Orang	114,780,000	
	a <u>Diklat Teknis Program Banggakencana</u>	20		6,000,000	
	b <u>Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga Tahun 2021</u>	15		108,780,000	
	c Pelatihan Teknis bagi SDM Kabupaten dan Kota				
	d Pelatihan Teknis Program Pembangunan Keluarga				
	e Pelatihan Pengelolaan Program KKBPB di Balai Diklat KKB				
	f Orientasi Teknis bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja				
	g Identifikasi Kebutuhan Diklat				
	h Pengembangan kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran				
	i Penjaminan Mutu Diklat				
	j Penyusunan Tata Laksana Diklat				
	k Fasilitas Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang dan Balai Diklat				
	l Pembinaan SDM provinsi				
	m Fasilitas Evaluasi Pasca Diklat				
	217 Pelatihan bagi Fungsional Tertentu	1	Orang	5,796,000	
	a <u>Pelatihan Dasar CPNS</u>	1		4,496,000	
	b Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi				
	c Orasi Ilmiah Widyaiswara				
	d Kegiatan/pelatihan lain untuk pemenuhan standarisasi kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional				
3331.ABN	Kebijakan Bidang Sosial				
3331.ABN.001	<i>Rekomendasi kebijakan hasil Penelitian dan pengembangan Program Bangsa Kencana</i>	1	Rekomendasi Kebijakan	90,000,000	
	2.1 Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Penelitian dan pengembangan Program Bangsa Kencana	1	Rekomendasi Kebijakan		
	218 Penerapan Hasil Litbang	1	Laporan	18,000,000	
	a Diseminasi hasil penelitian dan pengemabngan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana)				
	b Penyusunan dan Penerbitan Hasil Litbang melalui Media Publikasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana)				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	219 Pelaksanaan Penelitian	3	Dokumen	30,000,000	
	a Penelitian Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana)				
	b Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	220 Pelaksanaan Pengembangan	2	Jurnal	42,000,000	
	a Penyusunan dan Penulisan Jurnal Ilmiah				
	b Pelaksanaan Pengembangan KTI pada Jurnal Terakreditasi Global/nasional (provinsi yang memiliki peneliti)*				
	c Penyusunan Evaluasi Kegiatan Puslitbang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana)				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
068.WA	Program Dukungan Manajemen			48,217,921,000	
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			48,217,921,000	
Bidang Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi				48,007,421,000	
5297.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
5297.EAH.001	<i>Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>	1	Layanan	146,510,000	
	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker yang dilaksanakan	1	Layanan		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
266	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Kegiatan	21,500,000	
	a Sosialisasi, Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan				
	b Pembinaan Hukum bagi Pegawai				
	c Fasilitasi Kasus Hukum dan telaah/pendapat hukum yang Berkaitan dengan Institusi dan ASN				
	d Fasilitasi Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Daerah				
	e Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI WBK				
	f Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
267	Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Satker	32,710,000	
	a Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk. Pusat dan provinsi)				
	b Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaan, pengelola BMN dan petugas SAI Tk. Prov dg Mitra Kerja Terkait				
	c Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
	d Akselerasi Percepatan Pelaporan DAK Sub Bid KB Fisik dan Non Fisik bagi TIM Pengendali DAK Kab/Kota, Monitoring DAK				
	e Pelaksanaan Sosialisasi DAK Regional				
	f Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN				
	g Penatakelolaan barang persediaan dan pengelolaan gudang alkon serta Stock Opname alkon gudang provinsi				
	h Distribusi Alokon ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer)			5,210,000	
	i Pengelolaan BMN berupa sarana kerja (Labelisasi BMN existing dan manajemen daftar barang ruangan)				
	j Pengelolaan BMN dalam kondisi Rusak Berat (manajemen penghapusan Barang Milik Negara)				
	k Penyusunan Dokumen RKBMN satuan Kerja				
	l Peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa bagi Pokja ULP				
	m Penyelenggaraan SPIP				
	n Pengendalian BMN dalam proses hukum, dalam proses pembuatan dokumen kepemilikan (IMB, Sertifikat tanah), serta dalam sengketa yang belum masuk ke ranah hukum				
	o Manajemen pengendalian atas BMN yang berpotensi Idle				
	p Evaluasi pengelolaan BMN, pengendalian atas data hasil Revaluasi BMN				
	q Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
268	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	321	Pegawai	28,800,000	
	a Asesmen dalam rangka Talent Pool Calon JPT Pratama				
	b Agent of Change Provinsi				
	c Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (kenaikan jabatan fungsional, penilaian kinerja, mutasi, pensiun, dll)				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
269	Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran	1	Dokumen	43,000,000	
	a Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk. Provinsi dan Kab/Kota (Korenda)				
	b Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek/Musrenbangda Provinsi				
	c Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK)				
	d Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota				
	e Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II)				
	f Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota)				
	g Rapat Koordinasi Teknis pembahasan usulan DAK subbidang KB Kab Kota				
	h Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
	i Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
270	Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perwakilan BKKBN	1	Provinsi	20.500.000	
	a Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon dan non alkon Kab/Kota				
	b Monitoring DAK Kab/kota				
	c Fasilitasi Monitoring Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Perwakilan BKKBN Provinsi				
	d Bimbingan Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota				
	e Fasilitasi Rakomas				
	f Konsultasi dan bimbingan teknis ke pusat				
	m Evaluasi kinerja pelayanan umum melalui Vicon				
	n Konsultasi dan bimbingan teknis ke pusat terkait peningkatan layanan umum (administrasi perkantoran, rumah tangga dan protokol serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran)				
	o Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas				
	p Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
5297.EAA	Layanan Perkantoran				
5297.EAA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	47,735,911,000	
2.1	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	1	Layanan		
001	Gaji dan Tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi	13	Bulan Layanan	45.222.651.000	
	a Pembayaran gaji				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	b Pembayaran uang makan				
	c Pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi)				
	002 Operasional dan pemeliharaan kantor	12	Bulan Layanan	2,513,260,000	
	a Pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2, 4 dan 6)				
	b Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-mesin dan instalasi)				
	c Pemeliharaan gedung/bangunan kantor, gudang, rumah dinas				
	d Periamuan tamu				
	e Outsourcing (satpam, kebersihan, pramubakti, pengemudi dan penanggung jawab gudang alkon, dll)				
	f Pengurusan IMB dan pembayaran PBB				
	g Perpanjangan STNK				
	h Langganan daya dan jasa				
	i Penghapusan BMN				
	j Dukungan sarana dan prasarana Outsourcing				
	k Akses internet VPN dan Non VPN				
5297.EAD	Layanan Sarana Internal				
5297.EAD.951	Layanan Sarana Internal	5	Unit	125,000,000	
	3.1 Jumlah sarana Internal yang diadakan	5	Unit		
	271 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5	Unit	125,000,000	
	a Pengadaan laptop/ LCD/ Scanner/ Printer/ PC			125,000,000	1. Sarana kerja penunjang dalam mendukung kinerja di era new normal @ Rp 125 juta 2. Khusus untuk Jabar, Jateng dan Jatim terdapat alokasi sarana kerja balai diklat sebesar @ Rp 200 juta (balai diklat Bogor, Cirebon, Garut, Pati, Ambarawa, Jember, dan Malang)
5297.EAE	Layanan Prasarana Internal				
5297.EAE.951	Layanan Prasarana Internal	-	Unit	-	
	4.1 Jumlah prasana Internal yang diadakan/direnovasi	-	Unit		
	272 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	Unit	-	
	a Renovasi/Pembangunan Gedung dan bangunan				
Bidang Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi				210,500,000	
5297.EAK	Layanan Pengawasan Internal				
5297.EAK.001	Laporan Pengawasan Internal	1	Laporan	210,500,000	
	1.1 Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1	Laporan		
	273 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	Dokumen	210,500,000	
	a Evaluasi Pelaksanaan SPIP				
	b Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB				
	c Fasilitasi Pengawasan Mitra Kerja				
	d TLHP Internal dan Eksternal				
	e Evaluasi Program Pengawasan				
	f Rapat Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja				
	g Audit/Uji Petik (Bagi Auditor)/ Monev (Bagi Adminwas)				
	h Penyusunan Laporan PKPT PKAU Provinsi				
	i Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				

Catatan: Kegiatan yang mendukung ProPN dan Pendataan Keluarga mengacu dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon 2 Pengampu



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#017972

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN)

TRIWULAN IV
2021

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
3331.ABN Kebijakan Bidang Sosial								
1	3331.ABN.001 Rekomendasi kebijakan hasil Penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana	1	Rekomendasi Kebijakan	51,200,000	51,147,448	99.90	1	100 %
3331.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
2	3331.BDB.001 Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	171	Lembaga	59,749,000	59,749,000	100.00	171	100 %
3331.BMA Data dan Informasi Publik								
3	3331.BMA.001 Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	1	layanan	6,341,389,000	6,341,056,170	99.99	1	100 %
3331.DCJ Pelatihan Bidang Sosial								
4	3331.DCJ.001 SDM (internal dan eksternal) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	154	Orang	91,187,000	91,181,901	99.99	154	100 %

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
3331.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
5	3331.FBA.001 Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	24,414,000	24,413,351	100.00	4	100 %
6	3331.FBA.002 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40,474,000	40,474,000	100.00	1	100 %
7	3331.FBA.003 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	208,433,000	208,417,850	99.99	1	100 %
3331.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								
8	3331.QDC.001 Tim Pendamping Keluarga yang mendapatkan paket data	5556	Orang	555,600,000	548,887,400	98.79	5,488	99.0 %
3331.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
9	3331.QDD.001 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	Kelompok Masyarakat	203,795,000	203,788,400	100.00	422	100 %
10	3331.QDD.002 Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	Kelompok Masyarakat	32,385,000	32,385,000	100.00	143	100 %

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
11	3331.QDD.003 Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	Kelompok Masyarakat	67,142,000	67,132,160	99.99	5	100 %
12	3331.QDD.004 Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan	6	Kelompok Masyarakat	74,350,000	74,350,000	100.00	6	100 %
3331.QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga								
13	3331.QDE.001 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	51768	Keluarga	59,589,000	59,589,000	100.00	51,768	100 %
3331.QEI Bantuan Lembaga								
14	3331.QEI.001 Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	235	Lembaga	1,489,257,000	1,488,659,840	99.96	268	100 %
3331.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan								
15	3331.SCM.001 Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5556	Orang	503,389,000	502,764,000	99.88	5,481	99.0 %
5297.EAA Layanan Perkantoran								
16	5297.EAA.994 Layanan perkantoran provinsi	1	Layanan	41,482,405,000	40,620,389,234	97.92	12	100 %
5297.EAD Layanan Sarana Internal								

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
17	5297.EAD.951 Layanan pengadaan sarana internal provinsi	5	unit	124,680,000	124,680,000	100.00	5	100 %
5297.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								
18	5297.EAH.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	81,070,000	81,033,521	99.96	1	100 %
5297.EAK Layanan Pengawasan Internal								
19	5297.EAK.001 Laporan hasil pengawasan internal provinsi	1	Laporan	67,760,000	67,310,000	99.34	1	100 %

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja

[masih kosong]

